

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Batu

a. Sejarah Kota Batu

Kota Batu masih merupakan kecamatan dalam lingkup wilayah Pemerintahan Kabupaten Malang pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Kemudian pada tanggal 27 Februari 1993 status Kecamatan Batu resmi ditingkatkan menjadi Kota Administratif. Pembentukan kota administrative tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1993 yang ditandatangani Presiden Soeharto, dan dicatat dalam Lembar Negara Nomor 17 Tahun 1993. Wilayah Kota Administratif Batu terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Administratif Batu, Kabupaten Malang berubah status menjadi daerah otonom Kota Batu yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu yang tercatat dalam Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 2001. Maka pemerintah Kota Batu memiliki otorisasi untuk menjalankan roda pemerintahan di wilayah daerah otonom di bawah tanggung jawab walikota

sebagai kepala daerah. Kota Batu meliputi Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo yang terdiri dari 20 desa dan 4 kelurahan.

b. Kondisi Geografis

1) Letak, Batas dan Luas Wilayah Kota Batu

Secara astronomis, Kota Batu terletak pada posisi $122^{\circ}17'$ - $122^{\circ}57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'$ - $8^{\circ}26'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 19.908,72 Ha atau 0,42 % dari total luas Jawa Timur. Bentang wilayahnya berupa bukit, gunung, jurang terjal dan daerah dataran dengan batas wilayah sebagai berikut :

- > Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- > Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- > Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang
- > Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Secara administratif, Kota Batu dibagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji yang terinci 20 Desa, 4 Kelurahan, 226 RW dan 1.059 RT. Dari wilayah seluas 19.908,72 Ha tersebut, terbagi Kecamatan Batu seluas 4.545,81 Ha, Kecamatan Junrejo seluas 2.565,02 Ha dan Kecamatan Bumiaji 12.797,89 Ha.

c. Kondisi Geologis

Kota Batu mempunyai 4 (empat) jenis tanah antara lain: (1) Andosol, berupa lahan yang paling subur, meliputi Kecamatan Batu (1.831,04 Ha),

Kecamatan Junrejo (1.526,19 Ha) dan Kecamatan Bumiaji seluas (2.873,89 Ha).

(2) Kambisol, berupa tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu (889,31Ha), Kecamatan Junrejo (741,25 Ha) dan Kecamatan Bumiaji seluas (1.395,81 Ha) (3) Alluvial, berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu (239,86 Ha), Kecamatan Junrejo (199,93 Ha) dan Kecamatan Bumiaji seluas (376,48 Ha). (4) Latosol meliputi Kecamatan Batu seluas (260,34 Ha), Kecamatan Junrejo seluas (217,00 Ha) dan Kecamatan Bumiaji seluas (408,61 Ha).

d. Klimatologis

Sebagaimana layaknya daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kota Batu mengikuti perubahan putaran 2 (dua) iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada Tahun 2006, musim hujan dimulai bulan September diakhiri bulan Juni dengan kondisi cuaca relatif lebih kering dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan jumlah curah hujan maupun hari hujan mengalami penurunan. Menurut sumber dari Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu, rata-rata curah hujan mencapai 97,5 mm/bulan dari hari hujan per tahun sebanyak 128 kali.

Tingkat kelembaban udara Kota Batu hampir sama dengan rata-rata daerah lainnya di Jawa Timur, yaitu berkisar 30 % (minimum) pada bulan Oktober dan bulan Januari, sedangkan pada bulan Februari dan bulan Agustus tingkat kelembabannya sebesar 98 % (maksimum). Kecepatan angin mencapai 10,73 Km/jam.

e. Topografis

Bentang geografi Kota Batu berupa perbukitan dan pegunungan, dengan ketinggian \pm 800 meter di atas permukaan laut dan berada di lingkungan gunung Panderman (2.010 m) dan gunung Welirang atau Kemukus (3.156 m).

Desa Oro-oro Ombo dan Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu, Desa Tlekung dan Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo serta hampir seluruh desa di Kecamatan Bumiaji merupakan areal perbukitan. Desa Bumiaji, Bulukerto, Gunungsari, Punten, Tulungrejo, Sumbergondo dan Desa Giripurno berelief terjal. Sedangkan desa/kelurahan lainnya relatif datar. Kondisi demikian, menjadikan Kota Batu berhawa sejuk dengan suhu udara berkisar antara 17° - 25° Celcius.

f. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Salah satu komponen pokok yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan adalah masalah kependudukan, karena di samping posisinya sebagai sasaran pembangunan juga pelaku tunggal pembangunan. Kedua fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hasil registrasi kependudukan menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Batu dan tingkat kepadatannya sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2006 seperti tabel 3 berikut ini :

Tabel 3

**Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Batu
Tahun 2003 – 2006
(per-km²)**

No	Kecamatan	2003		2004		2005		2006	
		Jml. Penduduk	Kepa - data n						
1.	Batu	77.039	1.695	77.799	2.851	79.252	1.743	80.450	1.770
2.	Bumiaji	40.057	313	50.395	1.695	51.244	400	51.120	399
3.	Junrejo	49.852	1.944	39.668	1.695	40.201	1.567	40.758	1.589
	Jumlah	166.948	839	167.862	6.241	170.697	857	172.328	866

Sumber Data : BPS Kota Batu

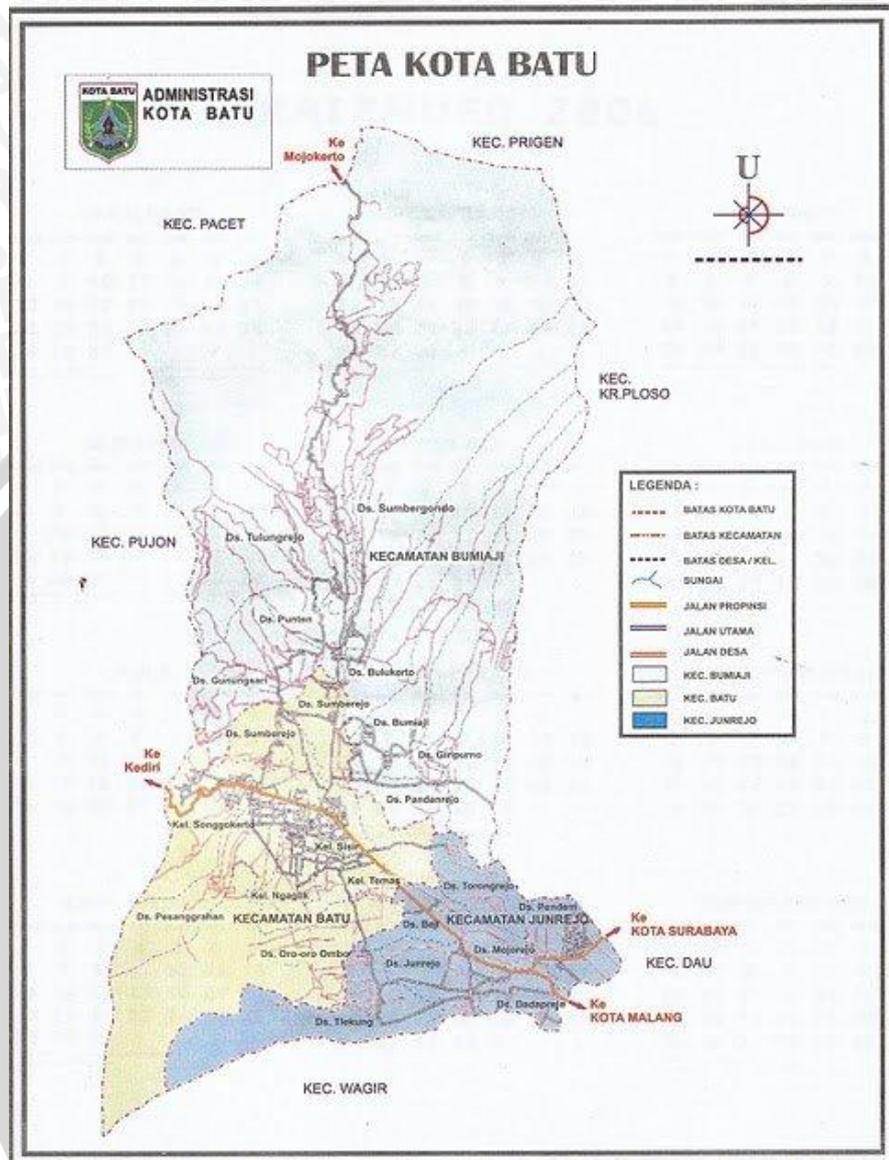
Data tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan jumlah penduduk per tahun sebesar 1,05% yang penyebarannya tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Batu yaitu sebesar 1.770 jiwa/km², disusul Kecamatan Junrejo sebesar 1.589 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bumiaji sebesar 399 jiwa/km².

Struktur penduduk menurut ketenagakerjaan dapat digolongkan berdasarkan penduduk usia kerja yaitu penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. Masing-masing jumlah angkatan kerja tingkat pertumbuhannya rata-rata per tahun 0,036% untuk angkatan kerja, 0,365% untuk jumlah orang kerja dan jumlah pengangguran peningkatannya sebesar 7,61%. Gambaran mengenai kondisi penduduk menurut ketenagakerjaan di Kota Batu tahun 2003-2006 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Tingkat Perkembangan Ketenagakerjaan
Kota Batu Tahun 2004-2006

No.	URAIAN	TAHUN			Ratio Perkembangan (%)
		2004	2005	2006	
1.	Jumlah Angkatan Kerja	90.439	93.578	93.612	0,036
2.	Jumlah Orang Kerja	83.208	85.952	85.406	0,635
3.	Jumlah Pengangguran	7.231	7.626	8.206	7,61
4.	PDRB Konstan (dln jutaan)	848.669,97	852.545,24	1.018.209,86	6,89

Sumber Data : BPS Kota Batu 2006



Gambar 3 Peta Kota Batu

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui otonomi daerah diantaranya berupa pelimpahan kewenangan dari Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan oleh Daerah. Seperti halnya yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No.

38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yaitu perencanaan pembangunan.

Pemerintah Kota Batu terbentuk semenjak Kota Batu menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan pelaksanaan urusan wajib dalam perencanaan pembangunan di Kota Batu, khususnya terkait dengan penyusunan kebijakan dan perencanaan, maka dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu.

Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah Bupati/ Walikota dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretariat Daerah (Sekda).

Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Batu melakukan perubahan organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a. Visi, Misi dan Tujuan Bappeda Kota Batu

- Visi dan Misi Bappeda Kota Batu Tahun 2007-2012

Visi Bappeda Kota Batu Tahun 2007-2012 adalah : ***“Terwujudnya Perencanaan Kota Wisata Berbasis Pertanian yang Aspiratif, Terpadu, dan***

Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Sedangkan

Misi daripada Bappeda Kota Batu Tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, tepat waktu, dan partisipatif berbasis keunggulan lokal.
2. Mengembangkan kapasitas organisasi perencanaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan bersih.
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

- Tujuan

Tujuan yang ditetapkan daripada visi dan misi Bappeda Kota Batu adalah :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan melalui pemantapan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah.
2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan secara kreatif dan inovatif dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung.
3. Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu maka terbentuklah struktur

organisasi yang baru Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu yang sebelumnya bernama Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Batu.

Badan Perencana Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bappeda sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Selama kurun waktu penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kota Batu, telah disusun berbagai kebijakan perencanaan pembangunan daerah, seperti halnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2007-2012, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD/ rencana tahunan),

dan perencanaan yang lain. Selain itu, di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Batu termasuk Bappeda, juga menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik di daerah, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Hal ini sejalan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang- Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kota Batu setiap tahun perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Batu dan LAKIP masing-masing SKPD. Dalam ketentuan penilaian untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penilaian tidak saja ditentukan kepada indikator tahun berjalan tetapi juga terhadap pencapaian RPJMD, RKPD, dan Renja yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP Bappeda Tahun 2012 untuk masa kerja tahun 2011, mengacu pada rencana kerja yang ditetapkan di tahun 2010.

Struktur Organisasi Bappeda Kota Batu yaitu :

1. **Kepala Badan**
2. **Sekretariat**, terdiri dari :
 - a. Sekretaris
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
 - d. Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. **Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup**, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
 - c. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
4. **Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya**, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya
 - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - c. Sub Bidang Sosial Budaya
5. **Bidang Perencanaan Ekonomi**, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
 - b. Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian
 - c. Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
6. **Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan**, terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan
 - b. Sub Bidang Data dan Pelaporan
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

1) Tugas dan Fungsi Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pembangunan serta statistik.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, penyusunan dan pengevaluasian rencana dan pelaksanaan pembangunan meliputi :
 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 3. Program-program tahunan sebagai pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang dan menengah;
- b. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di antarasatuan kerja perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal, kecamatan, kelurahan dan desa;
- c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah bersama instansi terkait dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
- d. Penyusunan bahan penelitian dan pengembangan serta statistik;
- e. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- f. Penyusunan dokumen anggaran badan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

2) Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan perpustakaan serta kearsipan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana program pembangunan daerah;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan serta perpustakaan;
- f. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan badan;
- g. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;

- k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - l. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
 - m. Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan kesekretariatan;
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
- c. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- d. Penyusunan Standar Pelaksanaan Minimal (SPM)
- e. Penyiapan bahan dan pembantuan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah
- f. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- g. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian

i. Pelaksanaan tugas-tuga lain yang diberikan oleh sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - c. Pengelolaan anggaran dan penyusunan administrasi keuangan;
 - d. Pelaksanaa pentausahaan keuangan;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran
 - f. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
 - g. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji karyawan;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - i. Pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian;

- b. Pelaksanaan keatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
- c. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

3) Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup

Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah serta lingkungan hidup, pertambangan dan sumber daya mineral serta telekomunikasi.

Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang;
- b. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pepaduan rencana pembangunan sarana dan prasarana wilayahserta lingkungan hidup, penataan ruang, pembangunan prasarana sumber daya alam dan lingkungan hidup, pertambangan dan mineral serta perhubungan dan telekomunikasi;
- c. Pengkoordinasian penyusunan program pembanguann sarana dan prasarana wilayah dan lingkungan hidup serta tata ruang;

- d. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang sarana, prasarana dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah;
 - e. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang prasarana dan prasarana wilayah serta lingkungan hidup dan perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan perencanaan penataan ruang serta penentuan program pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta lingkungan hidup;
 - g. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi.
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah.

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja sub bidang;
- b. Penghimpunan, pengevaluasian, pengelolaan dan penyajian data sarana dan prasarana wilayah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana wilayah;

- d. Pembantuan pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang sarana dan prasarana wilayah;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana wilayah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup dengan tugas dan fungsi.
 - Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup.
 - Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan rencana kerja sub bidang;
 - b. Pengumpulan, pengevaluasian, pengolahan dan penyajian data penataan ruang dan tata guna lahan yang meliputi pengaturan rancangan penataan ruang dan penatagunaan lahan serta lingkungan hidup yang meliputi pemanfaatan sumber daya alam, pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman dan pemeliharaan keserasian lingkungan hidup ;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup;
 - d. Pembantuan pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup;

- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub budang;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsi;

4) Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, aparatur dan sosial budaya.

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang;
- b. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pemaduan rencana pembangunan di bidang pemerintahan, aparatur, dan sosial budaya.
- c. Pengkoordinasian penyusunan program pembangunan di bidang pemerintahan, aparatur dan social budaya;
- d. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang pemerintahan, aparatur dan sosial budaya dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah;

- e. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang pemerintahan, aparatur dan sosial budaya, dan perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemerintahan, aparatur dan sosial budaya;
- g. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi.

- Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan aparatur.

Sub Bidang Pemerintahan Dan Aparatur mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan rencana kerja sub bidang;
- b. Pengumpulan, pengevaluasian, pengelolaan dan penyajian data di bidang pemerintahan dan aparatur;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan aparatur;
- d. Pengkoordinasian pnyusunan program tahunan di bidang pemerintah dan apratur;
- e. Penyiapan bahan pelaksaasn koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemerintahaan dan aparatur;

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsi.

- Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya.

Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan rencana kerja sub bidang;
- b. Pengumpulan, pengevaluasian, pengolahan dan penyajian data di bidang sosial budaya;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
- d. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sosial dan budaya;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsi.

5) Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Ekonomi

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi.

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang;
- b. Pelaksanaan, pembinaan, dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, kehutanan, industry dan pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, keuangan, investasi, dan bantuan dalam/ luar negeri;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di ekonomi, dan merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Pengkoordinasian penyusunan program pembangunan di bidang ekonomi;
- e. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ekonomi;
- i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi

- Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pariwisata dan pertanian.
- Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan rencana kerja sub bidang;
 - b. Pengumpulan, pengevaluasian, pengelolaan dan penyajian data di bidang pariwisata dan pertanian;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangua daerah di bidang pariwisata dan pertanian;
 - d. Pembantuan pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang pariwisata dan pertanian;
 - e. Penyiapan bahan palaksanaan koorninasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pariwisata dan pertanian;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan.

Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan rencana kerja sub bidang;
- b. Pengumpulan, pengevaluasian, pengolahan dan penyajian data di bidang koperasi, perindustian dan perdagangan;

- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang, koperasi perindustrian dan perdagangan;
- d. Pembantuan pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsi.

6) Tugas dan Fungsi Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan

Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, evaluasi dan pelaporan data perencanaan dan hasil pembangunan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang;
- b. Pembinaan dan pengkoordinasian pengumpulan data perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan data mengenai hasil pelaksanaan pembangunan;

- d. Pembinaan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, ekonomi, keuangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, teknologi serta sosial budaya;
- e. Penyusunan statistik mengenai hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- j. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi
 - Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data perencanaan pembangunan daerah.
Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja sub bidang;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data perencanaan pembangunan;
 - c. Penyajian dan pembantuan pengkoordinasikan data pelaksanaan pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanaan pembantuan dan penyiapan bahan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan program pembangunan daerah;
 - e. Penyusunan bahan analisis dan penelitian hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
 - f. Penyajian data dan penyiapan bahan pengevaluasian perencanaan pembangunan;

- g. Pengumpulan data dan informasi bahan penyusunan laporan pembangunan daerah;
- h. Penyajian dan penyiapan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan.
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan rencana kerja sub bidang;
 - b. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program serta melakukan penelitian dan pengembangan;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan penelitian dan pengembangan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - e. Pelaksanaan pengidentifikasikan, pengajian dan pengevaluasian dalam rangka penelitian dan pengembangan;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Pada tahap penyajian data, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran dan jawaban akhir dari permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian tersebut dibatasi oleh fokus penelitian yang telah dipaparkan pada Bab III dalam skripsi ini yakni mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Batu

a. Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Melalui Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan

Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara nyata dan positif terhadap penyusunan perencanaan dan implementasi pembangunan di daerahnya. Masyarakat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan keinginan kelompok masyarakat. Suatu perencanaan pembangunan tersebut juga akan tepat mengenai sasaran apabila sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk itulah diperlukan adanya peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yayat selaku Kepala bidang Data, Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA Kota batu yang mengatakan:

“Dalam semua proses perencanaan pembangunan seperti proses perencanaan pembuatan RPJMD, RPJP, dll masyarakat terus kita libatkan karena juga ada dasar undang-undang, jadi setiap kegiatan apapun kita berupaya melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya.” (Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2012 pukul 09.00 wib).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Suryanto Kasubag program dan Pelaporan BAPPEDA yang menyatakan:

“Pelibatan masyarakat dalam program pembangunan itu perlu, karena kita dapat mengetahui apa saja kebutuhan yang ada di masyarakat. Pada dasarnya setiap pembangunan muncul dari keinginan dan permintaan masyarakat yang mana pembangunan tersebut itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 11.30 wib).

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa masyarakat perlu diajak berperanserta atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini merupakan cara untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat seta untuk menetapkan program pembangunan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pemerintah dalam hal ini pihak BAPPEDA mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan tersebut perlu ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi sehingga pemerintah dapat melakukan pembinaan langsung kepada masyarakat karena pada akhirnya hasil pembangunan yang dilakukan di Kota Batu tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Sosialisasi sebagai proses komunikasi pembangunan, sosialisasi tidak sekedar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Fungsi sosialisasi masyarakat antara lain adalah pengembangan partisipasi masyarakat dalam bergam aspek pembangunan.

Sosialisasi perencanaan pembangunan kepada masyarakat merupakan proses awal sebelum dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu mengupayakan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dengan jalan mengadakan sosialisasi perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kota Batu seperti yang dikemukakan oleh Bapak Yayat selaku Kepala bidang Data, Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA Kota batu yang mengatakan:

“Ada pelibatan ormas dalam sosialisasi perencanaan pembangunan, mulai dari majelis ulama indonesia, walubi dan masih banyak lagi itu tetap kita libatkan. Bahkan ada juga dari instansi vertikal. Sebagai ormas nanti akan menyampaikan lebih dekat kepada masyarakat.” (Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2012 pukul 09.00 wib).

Berdasarkan data yang diperoleh, lembaga kemasyarakatan yang dilibatkan meliputi:

- Majelis Ulama Indonesia Kota Batu
- WALUBI Kota Batu
- BKSG Kota Batu
- MAWI Kota Batu
- Persada Hindu Dharma Kota Batu
- Kadin Kota Batu
- Asosiasi Gapoktan Kota Batu
- Asita Kota Batu
- ODTW Kota Batu
- Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia Kota Batu
- Forum Komunikasi Kota Batu

- Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Batu
- Muhammadiyah Kota Batu
- Nahdlatul Ulama Kota Batu
- Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Batu
- PKK Kota Batu

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pihak Bappeda menggunakan organisasi kemasyarakatan sebagai media untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang diharapkan dapat membantu peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan itu sendiri.

Hampir semua lembaga masyarakat yang ada di Kota Batu dilibatkan dalam sosialisasi perencanaan pembangunan di Kota Batu dan belum ada kriteria khusus dalam pemilihannya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yayat selaku Kepala bidang Data, Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA Kota batu yang mengatakan:

“Untuk lembaga masyarakat semuanya saja kita libatkan. Sejauh ini belum ada kriteria khusus, hanya saja yang kita lihat apakah dapat menjadi media kita untuk melakukan sosialisasi ini dan dapat menjangkau masyarakat yang seluas-luasnya.”(Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2012 pukul 09.00 wib).

Kemudian dipertegas oleh Bapak Suryanto Kasubag program dan Pelaporan BAPPEDA yaitu:

“Lembaga masyarakatnya dipilih dari lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, misalnya kalau di kalangan pemuda itu karangtaruna, kalau kalangan ibu-ibu ya lewat PKK, dan ormas-ormas lain saya kira banyak yang kita jadikan media untuk sosialisasi” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 11.30 wib).

Dari keterangan diatas dapat kita lihat pelaksanaan sosialisasi melalui lembaga masyarakat terbilang efektif dan bahwa pelibatan hampir semua lembaga kemasyarakatan yang ada di Kota Batu dimaksudkan agar dapat menjangkau masyarakat dari berbagai kalangan yang ada, sehingga pelaksanaan sosialisasi dapat merata di masyarakat.

a.1 Materi yang diberikan

a.1.1 Jenis materi yang diberikan dalam sosialisasi

Sosialisasi perencanaan pembangunan diharapkan mampu menyalurkan materi yang diberikan sehingga masyarakat dapat mengerti maksud dari sosialisasi yang diberikan tersebut. Dalam sosialisasi perencanaan pembangunan di Kota Batu, materi yang diberikan diharapkan dapat menarik minat dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Bapak Suryanto Kasubag program dan Pelaporan BAPPEDA menjelaskan sebagai berikut:

“Program-program pembangunan itu yang kita jelaskan pada masyarakat, yang pasti agar masyarakat tidak buta mengenai pembangunan yang terjadi dan jadi tahu masukan apa yang harus diberikan pada pemerintah, jadi kan masyarakatnya juga bisa berpartisipasi”(Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 11.30 wib).

Lebih jelas mengenai materi yang diberikan dalam pelaksanaan sosialisasi perencanaan pembangunan menurut Bapak Yayat selaku Kepala bidang Data, Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA menjelaskan sebagai berikut:

“Biasanya materi yang kita berikan adalah bagaimana pelaksanaan musrenbang tahun lalu, apa saja program-program pembangunan yang

dilaksanakan, program-program kebijakan untuk tahun depan, kemudian ada juga kita tampilkan berapa usulan yang telah disetujui oleh SKPD, kemudian program-program apa saja yang sudah berjalan sehingga otomatis masyarakat menjadi antusias dengan pembangunan.”(Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2012 pukul 09.00 wib).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian materi sosialisasi mengenai program-program pembangunan otomatis dapat merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Karena masyarakat dapat lebih mengerti bagaimana pembangunan yang akan dilaksanakan.

a.1.2 Bagaimanakah pemilihan pemberian materi pada masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan sosialisasi perencanaan pembangunan, dalam hal pemberian materi pihak BAPPEDA telah menentukan apa saja materi yang akan disampaikan pada masyarakat, pemilihan materi yang akan diberikan tersebut berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat serta didasarkan pada kondisi daerah yang akan diberikan sosialisasi, kemudian pihak BAPPEDA berusaha untuk memberikan materi yang sesuai dengan masyarakatnya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Budi selaku staff BAPPEDA:

“Pemberian materi tergantung pada kebutuhan tiap-tiap desa, apa yang dibutuhkan desa tersebut dan tergantung kondisi daerah atau desa itu, kemudian kita berusaha untuk mengakomodir kebutuhan tersebut agar sasarannya lebih mengena.” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 12.30 wib).

Pemberian materi didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat agar dapat tercapai tujuan dari sosialisasi perencanaan pembangunan tersebut. Serta pemberian materi dapat efektif sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Pemberian materi cenderung mengenai informasi-informasi mengenai kebijakan pemerintah di bidang pembangunan. Jadi dalam tiap desa maupun tiap kecamatan, pemberian materinya bisa saja berbeda karena tiap-tiap desa maupun kelurahan yang ada di Kota Batu memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda pula.

a.2 Tempat/Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi

Penentuan tempat/lokasi pelaksanaan sosialisasi ditentukan oleh masyarakat setempat dan berdasarkan lembaga kemasyarakatan mana yang akan diberikan sosialisasi, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budi selaku staff BAPPEDA yang mengatakan bahwa:

“Untuk tempat pelaksanaan sosialisasi sih biasanya tergantung pada tingkat mana kita melakukan sosialisasi tersebut, apakah itu ditentukan oleh ormas, atau biasanya kalau di tingkat desa ya di balai desa, pokoknya tergantung kondisinya”(Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 12.30 wib).

Lebih lanjut Bapak Yayat selaku Kepala bidang Data, Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kota Batu menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk tempat sosialisasi itu kita mendatangi masyarakat setempat agar masyarakat juga merasa lebih dekat sehingga kita dapat merangkul masyarakat agar mau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan”(Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2012 pukul 09.00 wib).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan tempat/lokasi penelitian didasarkan kepada masyarakat yang akan diberikan sosialisasi, hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat merasa diperhatikan dan aspirasi masyarakat memang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan

pemangunan daerah dan masyarakat merasa dirangkul oleh pemerintah dalam proses pembangunan.

a.3 Frekuensi Pelaksanaan Sosialisasi

a.3.1 Penentuan frekuensi pelaksanaan sosialisasi

Dalam proses penyebaran informasi dan sosialisasi mengenai perencanaan pembangunan di Kota Batu, pihak pemerintah harus dapat mengkomunikasikannya sedemikian rupa agar masyarakat dapat benar-benar mengerti, memahami, program-program pembangunan yang disampaikan dan dapat menerima program-program pembangunan tersebut, serta masyarakat mau memberikan dukungannya.

Untuk mencapai tujuan dari sosialisasi perencanaan pembangunan tersebut, maka frekuensi pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang penting. Melalui penelitian yang dilakukan pada BAPPEDA Kota Batu, dalam rangka pencapaian tujuan sosialisasi pembangunan kepada masyarakat, frekuensi pelaksanaan sosialisasi rutin ditentukan oleh kebutuhan masyarakatnya. Hal dikemukakan oleh Bapak Suryanto Kasubag program dan Pelaporan BAPPEDA yang mengatakan sebagai berikut:

“Biasanya sih masing-masing hanya sekali tapi jika dirasa masih kurang biasanya ada penambahan atau masyarakat bisa menentukan berapa kali untuk diadakan sosialisasi.”(Hasil wawancara tanggal 7 Maret 2012 pukul 11.30 wib).

Senada dengan hal tersebut, Bapak Yayat selaku Kepala bidang Data, Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA Kota batu mengatakan:

“Frekuensi sosialisasi maksudnya sering atau tidak gitu ya. Biasanya sih tergantung kebutuhan, kalau sekali dirasa cukup ya hanya sekali, atau

biasanya tiap bidang mempunyai kegiatan tersendiri”(Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2012 pukul 09.00 wib).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa BAPPEDA Kota Batu dalam penyebaran informasi program-program pembangunan melalui sosialisasi, frekuensi pelaksanaannya sebanyak satu kali atau lebih ditentukan menurut masyarakat setempat.

a.3.2 Adakah perbedaan frekuensi pelaksanaan sosialisasi pada tingkat desa dan kecamatan

Dalam pelaksanaan sosialisasi pembangunan pada tiap kecamatan maupun desa terdapat perbedaan frekuensi pelaksanaan sosialisasi, Bapak Suryanto Kasubag program dan Pelaporan BAPPEDA menjelaskan sebagai berikut:

“Meskipun biasanya kita hanya menetapkan hanya satu kali saja untuk pelaksanaan sosialisasinya, tapi selalu ada perbedaan frekuensi pelaksanaan sosialisasi karena kondisi tiap desa atau juga tiap kecamatan itu kan beda-beda ya.” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 11.30 wib).

Dalam pelaksanaan sosialisasi perencanaan pembangunan, terdapat perbedaan frekuensi pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi pada tiap desa maupun kecamatan di Kota Batu, untuk itu pihak BAPPEDA menentukan perbedaan frekuensi pelaksanaan sosialisasi berdasarkan kondisi yang ada pada tiap desa maupun kecamatan di Kota Batu.

a.3.3 Apa yang menjadi alasan adanya perbedaan frekuensi pelaksanaan sosialisasi

Dalam tiap desa dan kecamatan tempat dilaksanakannya sosialisasi perencanaan pembangunan umumnya terdapat perbedaan frekuensi pelaksanaan sosialisasi, hal ini dikarenakan pada tiap lokasi pelaksanaan sosialisasi keadaan masyarakatnya berbeda-beda. hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budi selaku staff dari BAPPEDA yang mengungkapkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan sosialisasi jumlah frekuensi bisa saja berbeda pada tiap desa dan kecamatan, biasanya di Kecamatan Junrejo bisa lebih dari sekali, soalnya disana masyarakat keras agak kaku seperti itu, jadi pelaksanaannya bisa sampai molor dari rencana awal.”(Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 12.30 wib).

Pernyataan ini didukung oleh Bapak Suryanto Kasubag Program dan Pelaporan BAPPEDA menjelaskan sebagai berikut:

“Masyarakat tiap kecamatan itu kan beda-beda. jadi biasanya ada di salah satu kecamatan itu pelaksanaan sosialisasi bisa memakan waktu lebih lama daripada di tempat lainnya. Masyarakatnya cenderung keras jadi biasanya kita perlu melakukan pendekatan pelan-pelan agar nantinya aspirasi masyarakat setempat dapat tetap tersalurkan” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 11.30 wib).

Dari berbagai hasil penelitian mengenai frekuensi pelaksanaan sosialisasi perencanaan pembangunan terdapat perbedaan frekuensi pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan pada suatu desa di Kota Batu masyarakat yang diberikan sosialisasi dinilai belum dapat menerima materi yang diberikan oleh pihak BAPPEDA, karenanya diberikan tambahan untuk sosialisasi perencanaan pembangunan agar tujuan dari sosialisasi perencanaan pembangunan kepada masyarakat Kota Batu dapat tercapai.

a.4 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam sosialisasi

Dalam sosialisasi perencanaan pembangunan melibatkan berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat agar penyebaran informasi pembangunan dapat mengenai sasaran dan dapat tercapai peningkatan partisipasi oleh masyarakat. Masyarakat mulai dari segala lapisan dilibatkan dalam kegiatan ini seperti yang dipaparkan oleh Bapak Budi selaku staff BAPPEDA yang mengatakan bahwa:

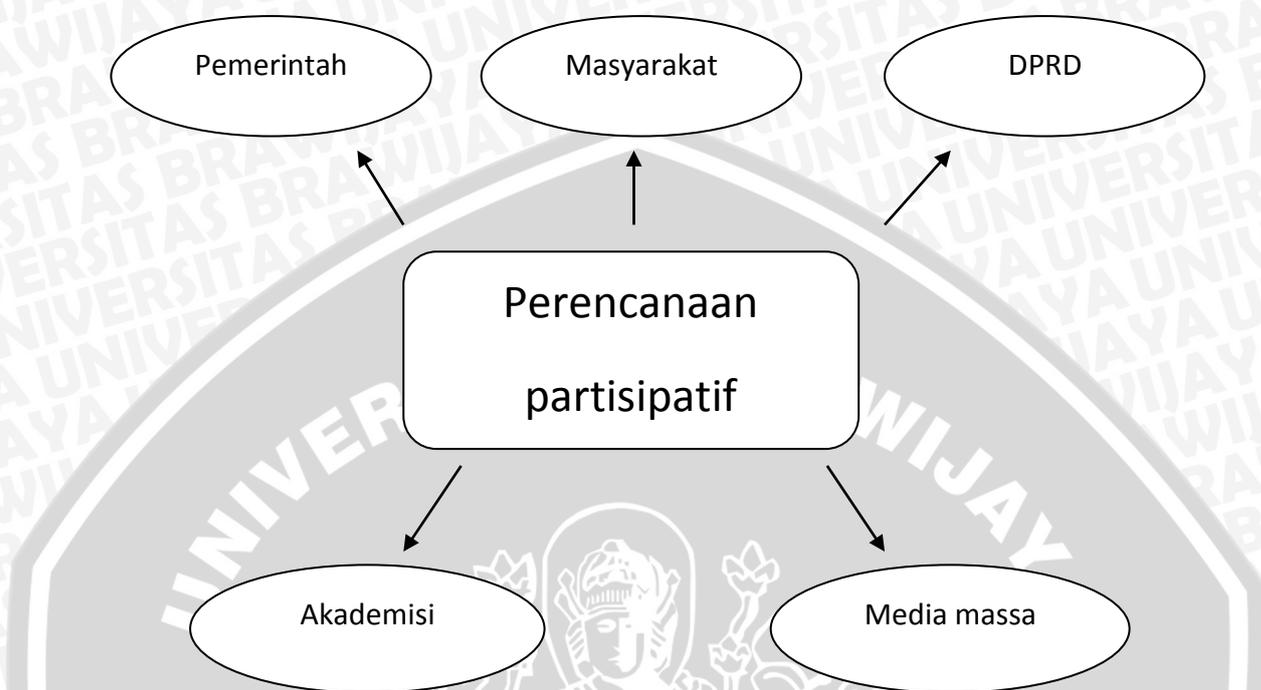
“Pihak yang terlibat sangat banyak mulai Ketua RT/RW, LPMD, BPD, perangkat desa dan juga tokoh masyarakat.”(Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 12.30 wib).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Yayat selaku Kepala bidang Data,

Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA Kota batu mengatakan:

“Ada pelibatan, tokoh keagamaan, kemudian ketua-ketua lembaga dan yang penting ada tokoh masyarakat, hampir semua lapisan berusaha kita libatkan kemudian juga ada fasilitator jadi seperti yang saya katakan tadi kita dapat menjangkau hampir semua masyarakat yang ada di Kota Batu ini.” (Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2012 pukul 09.00 wib).

Pada dasarnya dalam perencanaan pembangunan dengan sistem partisipatif terdapat keterlibatan komponen *civil society*. Tiga komponen utama dalam *civil society* yakni terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Kolaborasi ketiga komponen ini dapat menciptakan pemerintahan yang dibangun melalui pemanfaatan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini secara lebih luas lagi komponen *civil society* diuraikan dalam gambar berikut:



Gambar 5
Ilustrasi Komponen Perencanaan
Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan realitas tersebut, maka dalam proses sosialisasi perencanaan pembangunan, menjadi pihak-pihak yang terlibat didalamnya yang selanjutnya dapat diuraikan dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Unsur yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan

Unsur	Penjelasan
1	2
1. Pemerintah Kota Batu	Merupakan pihak yang memiliki otoritas paling besar dalam pembangunan.

1	2
2. Organisasi kemasyarakatan	Merupakan pelaku pembangunan yang banyak terlibat dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
3. DPRD	Merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan sebagai institusi pengontrol, budgeting dan regulasi dalam perencanaan pemerintah.
4. Media massa	Merupakan pelaku pembangunan yang lebih memfokuskan pada publikasi dan diseminasi informasi bagi publik.
5. Akademisi	Merupakan pemberi saran, masukan dan konsultasi dalam program-program pembangunan.

Sumber: data primer yang diolah

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa pelibatan segala lapisan masyarakat secara luas sangat diperlukan dengan tujuan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya mengenai pembangunan. Setiap kegiatan perencanaan pembangunan diadaan, pemerintah Kota Batu dalam hal ini pihak BAPPEDA menerapkan pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan. Maksud dari usaha pemerintah Kota Batu ini adalah melibatkan seluruh stakeholder terutama masyarakat Kota Batu dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Pihak BAPPEDA beranggapan bahwa perencanaan akan tepat sasaran apabila perencanaan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Batu. Dengan pelibatan banyak pihak dalam perencanaan pembangunan maka

masyarakat Kota Batu akan merasa memiliki tanggung jawab atas program-program yang akan dilaksanakan dalam pembangunan.

b. Bentuk sosialisasi

Penentuan bentuk sosialisasi sangat menentukan berhasil tidaknya sosialisasi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk komunikasi dalam proses pembangunan memiliki beberapa peran di antaranya adalah sebagai penghubung antara informan dan penerima informasi. Adanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan agar dapat mengikutsertakan partisipasi dari anggota masyarakat dalam proses pembangunan yaitu dengan jalan memperkenalkan atau memberikan informasi yang jelas mengenai program-program pembangunan. Dengan mengikutsertakan masyarakat di dalamnya maka akan tercipta hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah karena masukan-masukan maupun keluhan-keluhan dan kebutuhan masyarakat akan tersampaikan. Terdapat dua jenis bentuk sosialisasi perencanaan pembangunan yakni, bentuk sosialisasi *one way* dan bentuk sosialisasi *two way*.

b.1 One way

Bentuk sosialisasi *one way* merupakan jenis sosialisasi yang tidak memungkinkan adanya *feedback* dari penerima sosialisasi dalam satu proses penyampaian informasi. *Feedback* atau tanggapan yang ingin disampaikan masyarakat kepada pemberi informasi tidak dapat dilakukan waktu itu juga.

Dalam hal ini Bapak Yayat selaku Kepala bidang Data, Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA Kota batu mengemukakan bahwa:

“Sosialisasi pada masyarakat terjadi secara langsung. Dalam proses sosialisasi awalnya kita menyampaikan materi dulu dengan menjelaskan menjelaskan program-program pembangunan dan lain sebagainya tadi dengan cara memberikan pengarahan langsung pada masyarakat.”(Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2012 pukul 09.00 wib).

Berdasarkan hasil wawancara, dalam bentuk sosialisasi *one way* sistem yang digunakan yakni pemberian materi satu arah mengenai program-program pembangunan di Kota Batu. Dalam hal ini masyarakat hanya sebagai penerima informasi saja.

b.2 Two way

b.2.1 Pelaksanaan Bentuk Sosialisasi Two Way

Dalam bentuk sosialisasi *two way* memungkinkan adanya *feedback* atau tanggapan dari penerima (*receiver*) sebagai efek dari proses komunikasi yang dilakukan dengan pemberi informasi. Dalam komunikasi dua arah ini, pemerintah Kota Batu dapat juga menerima informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan *receiver* pertama juga dapat bertindak sebagai pemberi informasi. Memberikan masukan kepada pemerintah dan kemudian mendapat efek balik dari masukan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yayat selaku Kepala bidang Data, Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA Kota batu mengemukakan bahwa:

“Setelah kita berikan materi kemudian akan dibuka forum diskusi karena dalam diskusi ini nanti kita bisa tahu apa sih uneg-uneg masyarakat Batu ini dalam pembangunan, masyarakat itu inginnya apa

sih, juga bisa kita lihat disini.”(Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2012 pukul 09.00 wib).

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Suryanto Kasubag Program dan Pelaporan BAPPEDA menjelaskan sebagai berikut:

“Sosialisasi *two way* itu lebih dimaksudkan agar terdapat feedback dari masyarakat, kan setelah dijelaskan ini itu, kita juga bisa menilai apa masyarakat sudah bisa menerima dengan yang kita sampaikan dalam tanya jawab itu dan selama ini respon masyarakat dalam tanya jawab itu terbilang bagus. Mereka saling bertukar pikiran untuk pembangunan Batu kedepannya. Meskipun tidak semua masyarakat mau aktif.”(Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 11.30 wib).

Dalam pelaksanaan sosialisasi bentuk *two way*, masyarakat menyambut antusias dan saling bertukar pikiran serta masyarakat dapat mengungkapkan pendapatnya masing-masing tanpa ada batasan. Meski tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat, namun aspirasi masyarakat dapat tersalur dan dapat menjadi pertimbangan kebijakan yang akan diambil pemerintah Kota Batu dalam pembangunan.

b.2.2 Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Bentuk Sosialisasi *Two Way*

Kegiatan penyerapan sebagai langkah persiapan sebelum diadakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat tersebut digunakan dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan program pembangunan yang dibutuhkan sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi dan kemudian akan dijadikan bahan pembahasan di musrenbang. Pada saat diskusi masyarakat mengemukakan apa yang menjadi kebutuhannya meskipun nantinya keputusan akhir untuk program pembangunan

ditentukan oleh pemerintah, karena aspirasi yang masuk dalam forum diskusi dan tanya jawab tersebut tidak semuanya dapat dilaksanakan, hal tersebut didasarkan kesesuaian aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan Kota Batu. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Yayat selaku Kepala bidang Data, Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA Kota batu yang mengemukakan bahwa:

“Tentu saja tidak semua masukan dari masyarakat dapat kita laksanakan, semua aspirasi yang sudah masuk nanti kita pilih sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Batu, kalau sekiranya aspirasi yang masuk sesuai bisa kita jadikan bahan untuk menentukan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.” (Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2012 pukul 09.00 wib).

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa aspirasi yang telah masuk tidak serta merta dapat semuanya direalisasikan. Dengan kata lain hanya usulan yang telah disetujui saja yang bisa dimasukkan program pembangunan Kota Batu. Berikut ini disajikan tabel mengenai beberapa usulan masyarakat yang telah diakomodir pada tahun 2011 sebagai berikut:

Tabel 6

USULAN MUSRENBANG KOTA BATU TAHUN 2011 YANG DIAKOMODIR OLEH SKPD KOTA BATU TAHUN 2012

NO	USULAN MUSRENBANG KOTA BATU TAHUN 2011	DIAKOMODIR TAHUN 2012	VOLUME	LOKASI per-KECAMATAN			SKPD	KET.
				BATU	JUNREJO	BUMIAJI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	√						
1.1	Kegiatan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan (Biogas)		3 Unit	Oro-Oro Ombo (2 Unit)	Tlekung (1 Unit)		KLH	
2	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	√						
2.1	Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber- sumber Air (Sumur Resapan)		12 unit			Desa Giripurno {Dusun Sumpersari (2 unit), Kedung (2 unit), Krajan (2 unit), Sabrangbendo (2 unit), Sawahan (2 unit), Durek (2 unit)}	KLH	
2.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam perlindungan dan konsentrasi SDA REBOISASI BIBIT	√		8 Desa/Kelurahan	7 Desa/Kelurahan	9 Desa/Kelurahan	KLH	

3	Program Peningkatan Pengendalian Polusi 3.1 Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/ Cair yang menimbulkan polusi (Ipal Komunal)	√	2 paket		Puskesmas Beji	KLH	
4	Program Pengelolaan RTH 4.1 Penghijauan Kanan Kiri Jalan Protokol Pandanrejo	√	1000 pohon		jl. Raya Pandanrejo	KLH	
5	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 5.1 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani - Prasarana Unit gapoktan - Pengadaan Alat Pengukur Tanah 5.2 Peningkatan Sumberdaya Manusia Pertanian - Pelatihan SDM Pertanian - SL Pengendalian Hama Terpadu dan Produksi	√	-	8 Desa/Kelurahan	7 Desa/Kelurahan	9 Desa/Kelurahan	DIST ANH UT
6	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)						-

6.1	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija - Pengadaan benih padi dan jagung						DIST ANH UT	
6.2	Diversifikas Tanaman Pangan - Bibit kopi arabika	√	-	1 desa	1 desa	1 desa	DIST ANH UT	
6.3	Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri - Bibit Bawang Putih - Bawang Merah - Green House - Saluran Irigasi Pertanian - Pembangunan Plengsengan dan bahu jalan Sawah - Jalan Usaha Tani - Pembangunan Saluran Irigasi Tersier - Irigasi Sawah - Jitut/Jides - Jaringan Irigasi Desa - Bibit Hortikultura (Buah-buahan) - Bibit Tanaman Pangan - Bibit Jeruk (jeruk batu 55)	√	31 paket	8 Desa/Kelurahan	7 Desa/Kelurahan	9 Desa/Kelurahan	DIST ANH UT	

6.4	<ul style="list-style-type: none"> - Bibit Kentang - Bibit Apel - Bibit Strawberry <p>Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan/ Hortikultura Organik</p> <ul style="list-style-type: none"> - APPO - Pengembangan Areal Lahan Organik - Rumah Kompos - Peralatan Kompos 	√	10 paket	8 Desa/Kelurahan	7 Desa/Kelurahan	9 Desa/Kelurahan	DIST ANH UT	
7 7.1	<p>PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN</p> <p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi</p> <p>Pertanian/Perkebunan Tepat Guna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan Packaging Jenang Apel - Hand Tractor - Traktor kering - Alat perontok padi (huller) 						DIST ANH UT	
8 8.1	<p>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN</p> <p>Pendistribusian Bibit Ternak Kepada</p>						DIST ANH UT	

	Masyarakat - Bantuan bibit sapi - Bantuan bibit kambing - Bantuan bibit kambing gibas - Bibit bebek petelur						
9	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN						
9.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan - Pembangunan pasar hewan dan RPH						DIST ANH UT
10	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN						
10.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna - Peralatan Produksi Pengolahan Susu - Peralatan Produksi pakan Ternak - Chopper - Milk Can - Pabrik pengolahan susu	√	1 paket	8 Desa/Kelurahan	7 Desa/Kelurahan	9 Desa/Kelurahan	DIST ANH UT

Sumber: Data sekunder dari BAPPEDA Kota Batu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa telah ada penyerapan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang telah diakomodir oleh SKPD dan nantinya akan dijadikan bahan untuk penyusunan program-program pembangunan di Kota Batu.

b.2.3 Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD

Sebagai wakil rakyat, peran DPRD tidak lepas dari penanganan aspirasi masyarakat karena sudah menjadi kewajiban DPRD untuk mewakili masyarakat dalam menentukan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Batu. Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat memberi perintah secara tidak langsung kepada eksekutif untuk melaksanakan tugasnya. Dari sini menjadikan DPRD menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan pihak eksekutif atau pemerintah. Sudah menjadi keharusan DPRD mempunyai kemampuan untuk menyerap dan mengkomunikasikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, kemudian ditampung dan dibahas melalui mekanisme kerja, antara lain dalam forum rapat dewan yang diatur dengan tata tertib. Rapat yang dilakukan diantaranya adalah: rapat paripurna, rapat fraksi, rapat komisi, rapat dengar pendapat, rapat panitia musyawarah, rapat panitia anggaran, rapat gabungan komisi, rapat kerja dan rapat pansus.

a. Rapat Paripurna

Merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melakukan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dan menetapkan keputusan DPRD

b. Rapat Fraksi

Merupakan rapat anggota yang dipimpin oleh ketua fraksi atau wakil ketua fraksi.

c. Rapat komisi

Merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.

d. Rapat dengar pendapat

Merupakan rapat antara DPRD/komisi/gabungan komisi/panitia khusus dengan lembaga/badan organisasi kemasyarakatan.

e. Rapat panitia musyawarah

Merupakan rapat anggota panitia musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua musyawarah.

f. Rapat panitia anggaran

g. Merupakan rapat anggota panitia anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia anggaran

h. Rapat gabungan komisi

Merupakan rapat komisi-komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD

i. Rapat Kerja

Merupakan rapat antara DPRD/Panitia anggaran/komisi/gabungan komisi/panitia khususnya dengan bupati atau pejabat yang di tunjuk.

j. Rapat pansus

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Deni selaku staff pada bagian umum DPRD Kota Batu yang menjelaskan sebagai berikut:

“Aspirasi masyarakat nantinya akan dibahas melalui rapat-rapat di DPRD, ada rapat dengar pendapat dan masih banyak lagi, disitu nanti juga banyak yang akan dibahas. Karena idealnya kebijakan-kebijakan yang akan dibuat itu masyarakat dapat memberi masukan.” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Maret 2012 pukul 10.00 wib).

Penerimaan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD juga dilakukan pada saat masa reses yang disebut komunikasi konstituen. Penyerapan aspirasi pada masa reses merupakan bentuk aktif wakil rakyat di DPRD untuk mendengarkan dan melihat permasalahan, harapan, keinginan dan kritik masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Reses ini biasanya dilakukan selama satu hingga dua kali dalam satu tahun. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yani selaku anggota DPRD Kota Batu yang mengatakan bahwa:

“Agar kita tahu apa yang diinginkan masyarakat kita juga ada kegiatan reses, biasanya reses ini dilaksanakan satu hingga dua kali dalam setahun, tujuannya yakni untuk menamoung aspirasi-aspirasi dari masyarakat, sehingga dapat ditampung dan disampaikan ke pemerintah supaya dapat direalisasikan.” (Hasil wawancara pada tanggal 28 Maret 2012 pukul 13.00 wib).

Dari penjelasan tersebut nampak sekali bahwa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat maka kewajiban DPRD adalah memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat. Tugas DPRD dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat inilah yang mendapat banyak sorotan berbagai pihak. DPRD harus terus menyesuaikan berbagai tuntutan dan dukungan rakyat dengan mekanisme kerjasama normatif dengan eksekutif dalam hal ini pemerintah

Kota Batu untuk bersama-sama memajukan tingkat kehidupan rakyat melalui pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

b.3 Media massa

b.3.1 Media yang digunakan dalam proses sosialisasi perencanaan pembangunan

Kehadiran media massa dalam proses pembangunan menjadi hal yang tak terelakkan. Media massa merupakan saluran/alat komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Masyarakat luas menjadi tujuan dari penyebaran informasi. Media berfungsi untuk mensosialisasikan agenda-agenda pembangunan dari pemerintah. Pembangunan juga membutuhkan media massa sebagai masukan informasi tentang apa saja yang sekiranya masuk dalam program pembangunan tersebut.

Dalam perencanaan pembangunan di Kota Batu pihak BAPPEDA juga melibatkan media massa karena media massa dalam pembangunan memegang salah satu peran sentral. Media massa akan menjadi saluran yang dimana pihak-pihak berkepentingan dalam pembangunan saling menegosiasikan dan menyampaikan pesan dan makna apa yang hendak disampaikan di proses pembangunan tersebut. Media mampu memberikan informasi kepada masyarakat, mendekatkan informasi sampai ke semua lapisan masyarakat yang ada di kota maupun di daerah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yayat selaku Kepala bidang Data, Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA Kota batu mengemukakan bahwa:

“Dalam perencanaan pembangunan tentu saja kita memanfaatkan keberadaan media massa untuk membantu kita pihak pemerintah untuk dapat memberikan informasi seluas-luasnya pada masyarakat. Apalagi kan sekarang jaman sudah modern tiap hari jadi dengan orang nonton televisi, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya kan ya. Nah dengan begitu informasi tentang perencanaan pembangunan yang diliput oleh media bisa cepat sampai ke masyarakat”. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2012 pukul 09.00 wib).

Senada dengan hal tersebut, Bapak Suryanto Kasubag program dan Pelaporan BAPPEDA yang mengatakan sebagai berikut:

“Sejauh ini adanya media massa penting dalam penyebaran informasi perencanaan pembangunan, masyarakat bisa dengan mudah mengakses segala informasi mengenai pembangunan tanpa perlu repot-repot lagi sudah bisa disajikan lewat media massa. Jadi masyarakat bisa antusias untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di Kota Batu ini”. (Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 11.30 wib).

Dengan demikian, dalam proses penyebaran informasi mengenai perencanaan pembangunan, maka salah satu cara yang ditempuh BAPPEDA adalah dengan memanfaatkan media massa untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

b.3.2 Media massa apasaja yang digunakan sebagai sarana sosialisasi perencanaan pembangunan.

Pelibatan media dalam sosialisasi perencanaan pembangunan merupakan hal yang penting. BAPPEDA Kota Batu memanfaatkan media cetak yakni koran maupun majalah-majalah lokal di Kota Batu serta keberadaan televise local milik pemerintah Kota Batu sebagai alat untuk penyebaran informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

a) Surat Kabar

Surat Kabar memiliki peranan penting sebagai mitra dalam penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat, untuk itu BAPPEDA Kota Batu selalu memberikan informasi untuk disebarluaskan pada masyarakat melalui surat kabar. Adapun beberapa surat kabar yang beredar di Kota Batu antara lain:

- Jawa Pos
- Malang Pos
- Kompas
- Surya

Dengan adanya pemberitaan di berbagai media surat kabar maka masyarakat akan mudah mengetahui tentang perkembangan pembangunan yang terjadi di Kota Batu

b) Televisi Lokal

Tidak terbatas dengan hanya menggunakan media cetak, pemerintah juga memanfaatkan keberadaan televisi lokal, yakni Agropolitan Televisi (ATV). Bahkan diskusi pun bisa dilaksanakan dengan cara interaktif melalui televisi lokal tersebut. Hal tersebut seperti yang disampaikan Bapak Suryanto Kasubag program dan Pelaporan BAPPEDA yang mengatakan sebagai berikut:

“Iya media massa sangat membantu dalam memberikan informasi pada masyarakat, kita menggunakan koran untuk menjangkau masyarakat, kemudian juga lewat ATV. Malah kita bisa melaksanakan dialog interaktif lewat tv. Jadi kan bisa praktis, masyarakat dirumah pun bisa mengakses informasi pembangunan dari pemerintah” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 11.30 wib).

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan informasi dan pesan-pesan pembangunan dengan melalui televisi lokal, pihak pemerintah bisa langsung berdialog dengan masyarakat secara interaktif. Hal ini memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan pemerintah untuk menyampaikan masukan-masukan dalam bidang pembangunan.

Agropolitan televisi (ATV) sendiri mempunyai misi meningkat kualitas layanan informasi global dalam membangun masyarakat madani. Berikut ini daftar program-program Agropolitan televisi yang berfungsi memberikan informasi pada masyarakat.

Tabel 7
Program Acara Agropolitan televisi

No.	Program	Nama Acara
1	2	3
1.	News	<ul style="list-style-type: none"> - Agropolitan News - Sapulidi - Sari Warta - ATV Newstainment - Ngobrol Pagi (Ngopi) - News Report - Kilas Ruang DPRD
2.	Dialog	<ul style="list-style-type: none"> - Dialog pertanian - Ruang Praja - Ruang psikologi - Ekologi - Seputar kesehatan - Dialog pendidikan - Dialog ekonomi - Gardu demokrasi
3.	Magazine	<ul style="list-style-type: none"> - Traveling - Sport n Fun - Jejak prestasi remaja - Sebae'ye kite tau - Bhinneka khatulistiwa - Bumi Agropolitan

1	2	3
4.	Bincang-bincang	<ul style="list-style-type: none"> - Ranah perempuan - Café Agropolitan
5.	Special moment	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemerintah Kota Batu - Liputan khusus - Kegiatan masyarakat Kota Batu

Sumber: Data sekunder yang diolah

c. Metode sosialisasi

c.1 Pendekatan Bahasa

Dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat Kota Batu pihak BAPPEDA tidak serta merta melakukan sosialisasi langsung, pertama-tama dilakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat agar masyarakat merasalebih dekat dengan pemerintah, sehingga pemerintah pun akan lebih mudah untuk mengetahui apa kebutuhan masyarakat Kota Batu. Dalam hal ini BAPPEDA menggunakan pendekatan bahasa hal ini dikarenakan kondisi masyarakat yang terutama di desa tidak semuanya mengerti Bahasa Indonesia, penggunaan bahasa jawa juga dilakukan agar masyarakat yang diberi sosialisasi lebih mudah mengerti dan menangkap materi yang diberikan. Selain itu pendekatan kepada masyarakat lebih kepada penggunaan pendekatan yang bersifat kekeluargaan, sehingga nantinya masyarakat bisa nyaman dalam mengemukakan aspirasinya pada pemerintah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suryanto Kasubag program dan Pelaporan BAPPEDA yang mengatakan sebagai berikut

“Iya kita juga biasanya menggunakan bahasa jawa agar pendekatan kepada masyarakat lebih bersifat kekeluargaan, kan kalau sudah merasa dekat jadi

enak mau menyampaikan pendapat, tidak perlu khawatir ini itu.”(Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 11.30 wib).

c.2 Pendekatan Budaya

Selain menggunakan metode pendekatan bahasa, pihak BAPPEDA juga menggunakan metode budaya dalam rangka mendekati diri kepada masyarakat, yakni dengan mengadakan acara-acara kesenian seperti acara campursari, terbang jidor, kuda lumping, senterewe, kuda lumping dan lain sebagainya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suryanto Kasubag program dan Pelaporan BAPPEDA yang mengatakan sebagai berikut:

“Ya tentu saja kitapun juga menggunakan budaya sebagai cara untuk menarik minat masyarakat agar mau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, biasanya di desa-desa itu diadakan seperti pertunjukan kesenian misalnya saja ada acara campursari, terbang jidor, kuda lumping, senterewe, kuda lumping dan banyak lagi, sehingga masyarakat itu tertarik dengan hal tersebut dan akhirnya mau ikut dalam tahap perencanaan pembangunan”(Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 11.30 wib).

d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Mulai Tahap *Assessment*, Tahap Alternatif Program/Kegiatan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi Dalam Perencanaan Pembangunan.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat dalam penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan secara bersama mulai tahap *assessment* yakni pelibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki, tahap alternatif program atau kegiatan yakni melibatkan

masyarakat dalam menghadapi sebuah masalah dan menemukan cara untuk mengatasinya, tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan program yang telah direncanakan serta tahap evaluasi yakni pengawasan dari masyarakat terhadap program yang sedang berjalan. Dalam semua tahap partisipasi tersebut, pihak BAPPEDA Kota Batu berupaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat Kota Batu didalamnya, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yayat selaku Kepala bidang Data, Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA Kota batu mengemukakan bahwa:

“Untuk semua proses pembangunan sendiri masyarakat tetap kita libatkan, soalnya kita ada dasarnya undang-undang juga, bahwa dalam sebuah produk perencanaan pun kita harus ada konsultasi publik, itu masyarakatpun ikut, dalam setiap kegiatan kita pun tetap berusaha melibatkan masyarakat, masyarakat disini kalau bisa tidak hanya sekedar menyampaikan pendapat dan memberikan masukan tetapi juga dapat terlibat langsung dari mulai persiapan sampai nanti kita menjalankan programnya dan nanti juga ada evaluasi setelahnya. Kalau selama ini kita sih lebih menekankan partisipasi pada pelibatan dalam perencanaan program dan pelaksanaannya nanti”. (Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2012 pukul 09.00 wib).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat tidak hanya sekedar dalam poses persiapan program saja, namun juga dalam hamper semua tahapan pembangunan, meskipun hanya dalam tahap perencanaan program dan pelaksanaan program saja yang lebih ditekankan, tetapi tidak hanya terbatas pada hal tersebut, pihak BAPPEDA tetap berupaya melibatkan masyarakat mulai dari persiapan hingga evaluasi program pembangunan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Batu.

a. Faktor Pendukung

1) Fasilitas sarana prasarana

Pelaksanaan tugas pemerintahan yang kompleks, luas dan rumit akan dapat diselesaikan dengan baik apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan lengkap. Dan sebaliknya bila pelaksanaan tugas tanpa diimbangi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam arti kualitas maupun kuantitas dan manajemen pengelolaan yang baik, maka tidak akan bisa memberikan daya guna dan hasil yang memuaskan. Berikut tabel mengenai dukungan sarana dan prasarana di BAPPEDA Kota Batu:

Tabel 8 Data Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Batu

No	Spesifikasi Barang	Jumlah Barang	Satuan
	Jenis/ Nama Barang		
1	2	3	4
1	Bangunan Kantor	1	Unit
2	Mobil	4	Unit
3	Sepeda Motor	18	Unit
4	Meja Rapat	24	Buah
5	Komputer (PC)	35	Unit
6	Note Book	16	Unit
7	Laptop	2	Unit
8	Proyektor + Attachment	2	Buah
8	Hardisk eksternal	1	Buah
9	Printer	17	Buah
10	Monitor	9	Unit
11	Speaker multimedia	1	unit
12	Almari Arsip/ Almari Besi	17	Buah
13	Almari Buku	6	Buah
14	Almari Penyimpanan	2	Buah
15	Rak Audio Sound Sistem	1	Unit
16	Meja Komputer	3	Buah
17	Komputer Touchscreen + Box	2	Unit

1	2	3	4
18	Speaker Aktif	6	Buah
19	Switch Hub	4	Buah
20	Mesin Ketik Manual	2	Buah
21	Papan Tulis	11	Buah
22	Rak Arsip (kayu)	5	Buah
23	Rak Peralatan	1	Buah
24	Scanner	3	Buah
25	Infokus	2	Buah
26	Layar Infokus	2	Unit
27	Sound System	1	Unit
28	TV Berwarna + antena	3	Buah
29	Radio Tape	1	Buah
30	Wireless	3	Buah
31	Brankas	1	Buah
32	Brankas Besar	1	Buah
33	Pesawat Facsimile	2	Buah
34	Pesawat Telepon	2	Buah
35	Pesawat PABX	10	Buah
36	Kamera Video	2	Buah
37	Handycam	1	Buah
38	Alat Pengukur Waktu	7	Unit

Sumber : Dokumen Bappeda Tahun 2011

Kemudian kondisi aspek sarana dan prasarana tersebut digambarkan sebagai berikut :

1. Bappeda sudah memiliki gedung dan perkantoran sendiri yang representatif dan memadai di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda.
2. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ada dalam kondisi baik dan memadai untuk melakukan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Sampai tahun 2010, Kendaraan dinas/ operasional saat ini sudah ada 4 unit mobil dan 18 sepeda motor, sehingga cukup memadai untuk mendukung

kelancaran mobilitas dan mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

3. Meja, kursi, almari kantor dan ruangan yang ada kondisinya masih baik dan representative.
4. Perangkat komputer dan komponen pendukung yang ada mencukupi jumlahnya untuk peningkatan kapasitas kinerja Bappeda.
5. Program *Software* yang ada perlu dikembangkan kapasitasnya untuk proses perencanaan pembangunan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki BAPPEDA Kota Batu memberikan dukungan tersendiri terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan BAPPEDA, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fajar selaku staff BAPPEDA Kota Batu yang menyatakan bahwa:

“Fasilitas yang dimiliki BAPPEDA sekarang ini sudah cukup memadai untuk menunjang tugas pegawai disini dalam pelaksanaan kegiatan yang telah menjadi program kerja, meskipun tidak lengkap sekali tapi sejauh ini pelaksanaan kegiatan sangat dimudahkan dengan adanya sarana prasarana yang cukup memadai.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 13.30 WIB).

Dengan melihat data-data serta hasil wawancara diatas, sarana dan prasaran yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Batu.

2) Ketokohan

Keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan sangat tergantung pada manusia itu sebagai unsur pelaksananya. Oleh karena itu, faktor ketokohan dalam sosialisasi perencanaan pembangunan menjadi hal yang sangat penting.

Mengingat tipikal masyarakat pada umumnya mempunyai sosok yang disegani maupun yang dituakan dalam suatu lingkungan. Umumnya masyarakat apalagi di tingkat desa, memiliki ketergantungan yang tinggi kepada tokoh masyarakat setempat. Oleh karena itu keberadaan tokoh masyarakat bisa dijadikan sebagai factor yang mendorong/memotivasi mereka agar mau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di Kota Batu.

Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Yayat selaku Kepala bidang Data, Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA Kota batu mengemukakan bahwa:

“Melibatkan tokoh masyarakat itu harus malahan, tokoh masyarakat setempat mempunyai pengaruh terhadap bagaimana masyarakat sekitar itu merespon kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, kalau tokoh setempat dapat kita rangkul otomatis lebih mudah juga mengajak masyarakat.” (Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2012 pukul 09.00 wib).

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa keterlibatan dari tokoh-tokoh masyarakat mempunyai arti yang sangat besar dan sangat diharapkan oleh pemerintah sehingga diharapkan akan timbul partisipasi secara aktif dari masyarakat dalam pembangunan.

b. Faktor Penghambat

1) Pemahaman Masyarakat

Dalam praktek pelaksanaan sosialisasi di lapangan, terbukti masyarakat khususnya di tingkat desa belum benar-benar memahami mengenai tahap-tahap, proses maupun sistem dalam pembangunan daerah, masih banyak masyarakat yang salah memahami mengenai usulan yang mereka sampaikan, masyarakat menginginkan apa yang diusulkan segera direalisasikan saat itu juga, padahal

usulan tersebut yang akan digunakan sebagai bahan untuk pembuatan program pembangunan daerah untuk tahun depan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yayat selaku Kepala bidang Data, Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA Kota batu mengemukakan bahwa:

“Maunya masyarakat macam-macam, padahal anggaran kita terbatas, di desa itu biasanya usulan sekarang maunya juga dilaksanakan sekarang padahal kan itu untuk program pembangunan tahun selanjutnya. Itu sih biasanya yang salah pemahaman dari masyarakat.”(Hasil wawancara pada tanggal 1 Maret 2012 pukul 09.00 wib).

Disini jelas bahwa pemahaman masyarakat terhadap bagaimana proses perencanaan pembangunan masih rendah, karena kebanyakan mereka masih salah persepsi mengenai proses pembangunan di Kota Batu.

2) Rasa kurang memiliki terhadap pembangunan

Pada dasarnya banyak masyarakat yang belum memahami haknya sebagai warga Negara untuk memperoleh informasi serta turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya. Masyarakat umumnya memilih tidak menyalurkan aspirasinya karena beranggapan bahwa mereka merasa tidak ikut dalam merasakan hasil pembangunan, mereka merasa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pasti tidak berpengaruh pada wilayahnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suryanto Kasubag program dan Pelaporan BAPPEDA yang mengatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya pemahaman masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan masih terbilang lemah. Mereka merasa aksesnya dalam pembangunan ini masih sempit, karena masyarakat biasanya berpikir bahwa mereka tidak akan merasakan dampak dari pembangunan. Masyarakat bisa dibilang apatis terhadap kegiatan pemerintah dalam

pembangunan. Inilah mungkin yang membuat kita kadang sulit untuk merangkul masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan” (Hasil wawancara pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 11.30 wib).

Hal tersebut terlihat dari pernyataan dari beberapa masyarakat yang mengatakan:

i) Bapak Imam sebagai masyarakat Kota Batu

“Saya pernah beberapa kali hadir dalam kegiatan membahas masalah dan kebutuhan masyarakat, tapi yang diusulkan biasanya sulit untuk diwujudkan jadi saya memilih tidak mengikuti kegiatan lagi”. (Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2012 pukul 14.00 wib).

ii) Ibu Kurnia sebagai masyarakat Kota Batu

“Kalau sekarang gak tau apa rencananya pembangunan, kan saya rakyat kecil tidak ikut-ikutan seperti itu” (Hasil wawancara tanggal 10 Maret 2012 pukul 16.00).

iii) Pak Syafrudin sebagai masyarakat Kota Batu

“Terus terang saja saya kurang memahami perencanaan partisipatif, pernah dengar tapi saya tidak begitu tahu.” (Hasil wawanca tanggal 12 Maret 2012 pukul 14.30).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, masyarakat memiliki pemahaman yang kurang terhadap proses perencanaan pembangunan, hal ini menimbulkan Apatisme masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

C. Analisis Data

1. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Batu

Konsep pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat

sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah (Bab II hal 47).

Dalam perencanaan pembangunan, metode pendekatan perencanaan partisipatif diharapkan akan dapat menampung semua permasalahan dan potensi yang ada di daerah. Dengan metode ini dapat diperoleh suatu gambaran umum mengenai keadaan dan situasi desa serta aspek-aspek kehidupan masyarakat yang perlu mendapat perhatian khusus dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Conyers (1991:154) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting, yakni untuk memperoleh informasi dari masyarakat dan agar masyarakat lebih percaya kepada program pembangunan.

Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah/perangkat daerah dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selain itu, sejak tahun 1999 dikeluarkan berbagai instrument hukum berupa undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang membuka lebar ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan. UU 32/2004 tentang pemerintah daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, dan mendapatkan aspirasi masyarakat.

Sedangkan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan diatur dalam UU 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang merupakan forum antarpelaku dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Dalam forum ini pemerintah dan *stakeholders* secara bersama-sama merumuskan dan menetapkan prioritas pembangunan yang akan dibiayai pemerintah. Pelibatan masyarakat dilakukan secara bertahap melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diatur dalam Surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2005 dan No. 050/166/SJ.

Tabel 9

Proses Musrenbang Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2005 dan 050/166/SJ

Tahap	Kegiatan	Kelembagaan Masyarakat
1	2	3
Musyawarah ditingkat desa/komunitas	Pemisahan program skaladesa (yang didanai oleh DAUD) dan yang akan diusulkan ketingkat lebih tinggi (didanai APBD)	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta: terbuka untuk setiap warga • Pemilihan delegasi desa untuk perencanaan ditingkat yang lebih tinggi (3-5 orang)
Musyawarah ditingkat kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kompilasi usulan desa ke dalam sektor dengan skala kecamatan • Daftar program infestasi yang diusulkan untuk skala kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta; perwakilan dari desa, asosiasi di tingkat kecamatan • Pemilihan delegasi kecamatan (jumlah 3-5 orang)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan estimasi alokasi anggaran untuk kecamatan • Penetapan prioritas program infestasi di kecamatan (minimal 5 prioritas) • Penetapan prioritas program skala kota 	
Forum-forum sektoral	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar program skala kecamatan dan skala kota/kabupaten • Delegasi dari berbagai kecamatan membahas program investasi dengan sektor • Pembahasan tujuan dan program sektoral serta estimasi alokasi anggaran sektor • Penetapan prioritas program investasi (dirinci per 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta: delegasi kecamatan dan organisasi sektor yang bergerak dalam skala kota • Pemilihan delegasi forum sektoral skala kota untuk hadir di forum musrenbang kota/daerah

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> • kecamatan) • Penetapan program yang akan diajukan untuk dana Non-APBD 	
<p>Musyawarah ditingkat kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan tujuan dan indicator pencapaian kinerja pemerintah • Penepakatan estimasi pendapatan daerah • Mendaftar prioritas program/proyek skala kecamatan dan kota/kabupaten • Penetapan program /proyek skala kecamatan dan kota/kabupaten • Inventarisasi program/proyek yang telah disepakati dalam musrenbang kota/kabupaten • Dokumentasi program/proyek dan alokasi anggaran yang telah disepakati 	<p>Peserta; delegasi kecamatan dan delegasi forum-forum sektoral</p>
<p>Pasca musyawarah ditingkat kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RKPD • Penyusunan kebijakan umum, strategi, dan plafon APBD • Penyusunan RKA-SKPD • Pembahasan dan penetapan APBD • Monitoring dan evaluasi program 	<p>Peserta; delegasi kecamatan dan forum sektoral yang hadir dalam musrenbang kabupaten/kota</p>

Sumber: Dokumen Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2005 dan 050/166/SJ

Lebih lanjut, bilamana proses perencanaan partisipatif itu dapat berlangsung, maka diharapkan akan mampu meningkatkan peran serta masyarakat, yang berarti pula memberdayakan masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Maka dari itu

agar tercipta partisipasi masyarakat yang nyata dimana partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang tidak hanya dijadikan sebagai simbol dan formalitas semata, pemerintah Kota Batu dalam hal ini BAPPEDA Kota Batu berupaya melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Peran serta masyarakat disini sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan jadi perlu disertai dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat salah satunya dengan jalan melakukan sosialisasi mengenai perencanaan pembangunan kepada masyarakat Kota Batu agar aspirasi masyarakat dapat tersalur dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang menghasilkan kesepakatan dan komitmen antara pemerintah daerah dengan unsur masyarakat.

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik, Rekso Putranto (1992:51-52) mengatakan bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Untuk itu sesuai dengan teori yang disampaikan Rekso Putranto diatas, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2007-2012, masalah akses partisipasi publik dalam pembangunan menjadi salah satu masalah yang diangkat yang perlu mendapat penanganan, hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Batu dalam berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Batu dalam pembangunan karena pada dasarnya proses perencanaan dimulai dengan informasi

tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan bertujuan untuk menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcomes atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, sehingga masyarakat sendirilah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Perlu dibuka ruang-ruang publik yang lebih luas yang bisa berupa public hearing, diskusi, seminar agenda pembangunan atau lewat berbagai acara atau media yang pada intinya mengajak masyarakat terlibat dalam rencana-rencana pembangunan yang akan dilakukan. Dari sana diharapkan tumbuh semangat memiliki dan rasa tanggungjawab dari masyarakat terhadap sarana prasarana yang dibangun atau pada pembangunan secara keseluruhan. Jadi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada.

a. Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Melalui Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan

Agar pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik sesuai kondisi obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan.

Perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh warga masyarakat dalam pembangunan daerahnya, merupakan metode atau cara perencanaan yang memfungsikan kelembagaan masyarakat secara nyata di dalam menyusun

perencanaan pembangunan. Melalui metode perencanaan partisipatif diharapkan akan ada hubungan yang erat antara masyarakat dengan kelembagaan masyarakat secara terus menerus. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyatakan masalah yang dihadapi dan gagasan-gagasan sebagai masukan untuk berlangsungnya proses perencanaan berdasarkan kemampuan warga masyarakat itu sendiri. Dengan adanya partisipasi, diharapkan masyarakat mau dan mampu melaksanakan, memelihara, dan menindak-lanjuti hasil-hasil pembangunan. Sehingga partisipasi masyarakat tersebut menjadi hal yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kelembagaan sebagai saluran partisipasi masyarakat yang relevan untuk dijadikan sebagai saluran partisipasi dengan syarat organisasi tersebut harus bersifat independen bebas dari campur tangan pemerintah. Organisasi kemasyarakatan dan LSM yang jumlahnya sangat banyak misalnya organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, kehutanan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, buruh, kelautan dan lain-lain, hemdaknya membentuk asosiasi sesuai dengan bidangnya. Melalui asosiasi inilah masyarakat dapat menyusun visi dan misi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan dalam menyusun kebijakan pembangunan. Melalui asosiasi yang terorganisir dan independent ini pula, organisasi kemasyarakatan dan LSM mempunyai kekuatan untuk melakukan kontrol terhadap produk kebijakan maupun implementasi kebijakan apakah kebijakan tersebut berpihak kepada kepentingan rakyat atau tidak. Jadi disini pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan saling bekerjasama agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, Partisipasi merupakan suatu proses maka diperlukan pendekatan pendahuluan yaitu pengenalan dan sosialisasi kegiatan. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi mengenai program-program pembangunan untuk meningkatkan partisipasinya dalam proses pembangunan. Sosialisasi program merupakan bentuk kegiatan komunikasi pembangunan dimana pemerintah dapat memberikan informasi langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh pendidikan mengenai proses pembangunan serta mereka dapat berpartisipasi secara aktif didalamnya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Solihin (2007:12) bahwa untuk membangun partisipasi rakyat yaitu dengan membuka dialog dengan masyarakat, jadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terdapat kegiatan yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan program pembangunan yaitu sosialisasi program perencanaan pembangunan. Dimana dalam kegiatan sosialisasi tersebut masyarakat dan pemerintah dapat berinteraksi secara langsung. Dalam sosialisasi perencanaan pembangunan di Kota Batu, pemerintah setempat melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Batu sebagai media untuk menjangkau masyarakat yang seluas-luasnya, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Solihin (2007:12) agar pemerintah daerah dalam proses pembangunan untuk memberikan sebanyak-banyaknya kepercayaan kepada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Lembaga kemasyarakatan yang dilibatkan disini meliputi dari berbagai bidang yakni bidang lingkungan hidup, keagamaan, organisasi profesi, serta organisasi sosial lainnya.

Untuk pemilihan lembaga kemasyarakatan apa saja yang terlibat dalam sosialisasi perencanaan pembangunan tidak terdapat kriteria khusus, hanya saja lembaga kemasyarakatan yang dilihat paling dekat dengan masyarakat golongan tertentu akan dipilih, misalnya saja untuk memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu maka akan dilakukan sosialisasi melalui PKK, kemudian sosialisasi kepada pemuda-pemuda di Kota Batu akan dilaksanakan melalui organisasi karang taruna, dan lembaga-lembaga lain yang dapat mewakili kelompok masyarakat tertentu.

a.1 Materi yang diberikan

Partisipasi dalam pembangunan dipandang sebagai sebuah metodologi yang mengantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dapat menganalisa dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi dalam pembangunan. Pemberdayaan partisipasi masyarakat sipil atau '*civil society*' merupakan alat ampuh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan pada masa-masa mendatang, keterlibatan ini akan memberikan dampak yang positif terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil atau yang akan di implementasikan, karena dapat membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Untuk itu dalam sosialisasi perencanaan pembangunan pemerintah perlu memberdayakan masyarakat dengan memberikan informasi yang cukup tentang Visi, Misi dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan.

Dalam hal ini pemerintah dituntut kesiapannya dalam hal merumuskan kebijakan, merencanakan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Demikian juga dalam mengembangkan atau menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada, sehingga tercipta daerah yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan.

Dibutuhkan langkah-langkah yang memungkinkan masyarakat untuk kembali memperkuat pemahaman, pengetahuan dan teknik-teknik yang dimiliki, khususnya untuk bisa ikut mengambil bagian secara produktif dan demokratis dalam proses politik dalam hal ini pengambilan kebijakan ditingkat daerah. Untuk mencapai tujuan daerah maksud ini dapat dikembangkan melalui berbagai program penguatan yaitu dengan pemberian pendidikan bagi masyarakat dalam proses pembangunan.

Guna mempermudah dan memaksimalkan pesan program dalam sosialisasi ini terdapat komunikasi dengan tujuan menghasilkan kepercayaan, sikap, dan perilaku masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Dila (200:159) bahwa komunikasi dalam pembangunan merupakan proses penyebaran informasi, penerangan, pendidikan dan keterampilan, rekayasa sosial dan perubahan perilaku. Dalam hal ini sosialisai perencanaan pembangunan difokuskan pada usaha penyampaian dan pembagian (sharing) ide, gagasan, dan inovasi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat. Pada proses tersebut, informasi dibagi dan dimanfaatkan bersama-

sama dan seluas-luasnya sebagai sesuai yang berguna untuk kehidupan. Dengan bekal pemberian materi pembangunan, masyarakat dapat lebih kritis dan mandiri memahami posisinya serta lingkungannya. Melalui interaksi, informasi, komunikasi, dan sosialisasi dalam berbagai saluran, proses komunikasi pembangunan kemudian dianggap sebagai bentuk pencerahan, penguatan dan pembebasan dari ketergantungan dan keterbelakangan sehingga mempermudah menerima suatu inovasi yang ditujukan kepada mereka. Pemberian materi yang sistematis, terencana dan terarah, dapat menghasilkan transformasi ide, gagasan atau inovasi melalui informasi yang disebarluaskan dan diterima sehingga menimbulkan partisipasi masyarakat dalam melakukan perubahan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian pada penyajian data, dalam kegiatan sosialisasi perencanaan pembangunan di Kota Batu diberikan materi-materi yang meliputi program-program kebijakan pembangunan untuk tahun depan, data mengenai usulan yang telah disetujui oleh SKPD, dan program-program pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah. Setelah masyarakat mengetahui dan mengerti program-program yang ditawarkan, maka mereka akan bisa diajak bekerjasama mewujudkan pembangunan. Pada saat yang sama masyarakat akan terbuka minatnya untuk berpartisipasi dengan menyampaikan rencana kerja yang sudah mereka miliki.

Dalam proses ini masyarakat juga diajak untuk mengetahui, menggali, dan mengumpulkan informasi masalah-masalah yang ada disekitarnya. kemudian masalah tersebut di seleksi atau dirumuskan sehingga dihasilkan masalah yang

memang benar-benar harus segera ditangani sehingga masyarakat akan mengerti apa sebenarnya arti sebuah perencanaan yang mempunyai komponen penting yaitu tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakantindakan masa depan (untuk masa depan). Proses sosialisasi memang tidak singkat, tetapi manfaatnya terhadap keberhasilan proyek sangat besar.

Dalam pemberian materi pun pihak BAPPEDA akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang akan diberikan sosialisasi, hal ini dikarenakan terdapat kondisi masyarakat yang berbeda-beda pada tiap desa maupun kecamatan di Kota Batu. Jadi bisa saja terdapat perbedaan materi yang diberikan antara desa satu dengan dengan desa yang lain, antara kecamatan serta antara organisasi kemasyarakatan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman masyarakat terhadap program-program pembangunan serta tentang sistem penyelenggaraan perencanaan pembangunan dapat diterima dengan baik.

a.2 Tempat/Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi

Dalam sosialisasi perencanaan pembangunan terdapat pendekatan komunikasi khusus kepada masyarakat agar mereka mau menerima pesan dan informasi yang sebagai tujuan sosialisasi. Rogers dalam Taufan (2009:1) mengatakan komunikasi tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan para perencana pemerintah, dan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana-rencana

pembangunan. Dari pendapat ini jelas bahwa setiap pembangunan dalam suatu bangsa memegang peranan penting. Dan karenanya pemerintah dalam melancarkan komunikasinya perlu memperhatikan strategi dan pendekatan yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga efek yang diharapkan itu sesuai dengan harapan. Untuk itu penentuan tempat/lokasi untuk diselenggarakannya sosialisasi juga berpengaruh pada masyarakat, karena jika sosialisasi dapat dijangkau mudah oleh masyarakat, maka paling tidak dapat mendorong masyarakat untuk mau terlibat didalamnya. Dalam hal ini pemerintah berusaha menjangkau masyarakat dengan cara mendatangi masyarakat secara langsung, karena dengan begitu masyarakat bisa mengetahui bagaimana proses pembangunan berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian, penentuan tempat/lokasi sosialisasi ditentukan tergantung dari masyarakat mana ataupun organisasi kemasyarakatan mana yang akan diberikan sosialisasi. Misalnya jika masyarakat yang akan diberikan sosialisasi berada di desa, maka pemerintah akan melakukan sosialisasi langsung di daerahnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat juga dapat merasa dekat dengan pemerintah dan merasa bahwa masyarakat tidak ditinggalkan dalam proses pembangunan, dalam hal ini keterlibatan masyarakat sangat diharapkan oleh pemerintah.

a.3 Frekuensi Pelaksanaan Sosialisasi

Yang dimaksud frekuensi sosialisasi disini adalah jumlah waktu yang dibutuhkan dalam memberikan sosialisasi perencanaan pembangunan kepada

masyarakat. Disadari bahwa mensosialisasikan program bukan suatu tugas yang mudah dan bisa dikerjakan dengan hanya satu kali pertemuan. Perlu melakukan pendekatan-pendekatan khusus kepada masyarakat agar mereka memahami apa maksud dan tujuan diselenggarakannya sosialisasi perencanaan pembangunan. Jadi, kegiatan ini bisa jadi membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Terkait dengan *sosialisasi perencanaan pembangunan yang dilakukan kepada masyarakat*, Setiap tahap akan memerlukan waktu, pemikiran dan respon yang berlainan dari tiap masyarakat yang berbeda pula. Seperti yang disampaikan oleh Agusta (2008:1) bahwa Dalam komunikasi interaksi stimulus yang sama mungkin menghasilkan respons yang berlainan dari orang-orang yang berbeda atau oleh orang yang sama pada waktu yang berlainan. Untuk itulah frekuensi pemberian sosialisasi perencanaan pembangunan menjadi berbeda-beda pada tiap daerah karena respon dari masyarakat terhadap penyampaian pesan dalam sosialisasi pun beragam.

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab penyajian data, pelaksanaan partisipasi masyarakat pada tiap daerah tentu memiliki frekuensi berbeda disesuaikan dengan keadaan tiap daerah yang mempunyai ciri khas tertentu. Daerah dengan penduduk yang bersifat lebih keras akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk dilakukan pendekatan agar mereka mau menerima materi sosialisasi yang diberikan. Begitupun sebaliknya, daerah yang lebih mudah untuk dilakukan pendekatan, hanya membutuhkan satu kali pertemuan saja dalam pelaksanaannya. Seperti yang dijelaskan diatas hal ini terjadi karena tiap daerah

memiliki kondisi masyarakat yang berbeda-beda, untuk itu frekuensi pelaksanaan sosialisasi yang diberikan akan berbeda pula.

a.5 Pihak-pihak yang dilibatkan dalam Sosialisasi

Dalam sosialisasi pembangunan terdapat peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan melihat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan partisipatif adalah Perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan stakeholders ini adalah untuk memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Dalam sosialisasi perencanaan pembangunan di Kota Batu pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan ini, antara lain:

- 1) Unsur Pemerintah Desa/Kelurahan seperti : Kepala Desa/Kelurahan, Sekretaris Desa, Kaur/Kasi dan staf di jajaranya.
- 2) BPD (Badan Perwakilan Desa).
- 3) LPMD/LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/kota)
- 4) Tim Penggerak PKK.
- 5) Forum Masyarakat Kota.
- 6) Kepala Dusun.
- 7) Tokoh masyarakat

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Samsura dalam Fitriasturi (2005:40) yang mengemukakan kriteria-kriteria dari perencanaan partisipatif salah satunya adalah adanya melibatkan seluruh *stakeholders*. Dalam hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dapat sesuai dengan kondisi daerah dan masyarakatnya sehingga pembangunan yang dilakukan dapat merata karena hasil pembangunan dapat mewakili seluruh kebutuhan masyarakat daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, BAPPEDA Kota Batu berusaha merangkul berbagai macam pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan sosialisasi perencanaan pembangunan mulai dari ketua RT/RW, LPMD, BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Hal ini agar penyampaian sosialisasi pembangunan dapat merata di segala lapisan masyarakat.

Kemudian seperti yang telah dipaparkan dalam Gambar 5 pada sub bab penyajian data, bahwa perencanaan pembangunan yang partisipatif pada dasarnya melibatkan semua pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) yang terdiri dari Pemerintah, DPRD, Masyarakat, Akademisi serta media massa. Kolaborasi antara pihak-pihak berkepentingan tersebut diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat, sehingga akan terlaksana pembangunan yang bermanfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Batu.



b. Bentuk Sosialisasi

Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi perlu diberikan karena tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan yang mereka inginkan. Masyarakat sendiri yang akan merasakan dan menilai apakah pembangunan tersebut berhasil atau tidak. Maka agar tujuan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah, diperlukan persepsi yang sama antar individu yang terlibat dalam pembangunan. Persamaan persepsi diperlukan mulai dari apa yang harus ditempuh, bagaimana implementasinya, monitoring dan evaluasi. Akhirnya pendekatan partisipatif disadari mutlak diperlukan dalam mencapai keberhasilan pembangunan.

Penerapan bentuk sosialisasi merupakan hal yang vital, karena pesan yang disampaikan kepada masyarakat harus dengan cermat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat menarik masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya. Dewi (2007:15) menyatakan bahwa pesan dalam proses komunikasi akan menimbulkan reaksi dan umpan balik diantara semua pelaku komunikasi apabila pesan tersebut menarik dan mampu memahami kebutuhan pribadi komunikan.

Penerapan komunikasi dalam penyelenggaraan sosialisasi perencanaan pembangunan memungkinkan masyarakat terlibat berpartisipasi aktif secara dialogis dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hedebro dalam Nasution (2004:102) menyatakan bahwa peran komunikasi interaksional dalam proses pembangunan, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan, diantaranya adalah meningkatkan

aspirasi masyarakat dan membuat masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam hal ini terdapat dua bentuk sosialisasi yang digunakan dalam sosialisasi perencanaan pembangunan, yakni bentuk sosialisasi *one way* dan *two way* maupun dengan menggunakan perantara media massa.

b.1 One Way

Gagasan-gagasan mengenai kebijakan dan rencana hanya akan dapat dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat. Sebab hal tersebut mencerminkan sebagai atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat. kemudian diterima dengan pengertian masyarakat, bahwa hasil dari kebijakan rencana itu akan betul-betul sebagian atau seluruhnya dipetik masyarakat. Disadari bahwa dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat penting, namun kemampuan masyarakat pada umumnya masih relatif terbatas. Untuk itu menjadi tugas pemerintah untuk memberikan materi mengenai pembangunan kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam tahap perencanaan pembangunan. Dengan demikian muncullah sosialisasi dengan model *one way* (satu arah) dimana terjadi komunikasi satu arah terlebih dahulu antara masyarakat dan pemerintah. Club Du sahel dalam Mikkelsen (2001:69-70) mengemukakan pendekatan-pendekatan partisipasi, salah satunya yakni Partisipasi pasif, pelatihan dan informasi dengan sistem pendekatan “kami lebih tahu apa yang baik bagimu” maksudnya yaitu komunikasi satu arah seperti antara guru dan murid yang diterapkan antara staf proyek dan masyarakat yakni dengan memberikan masyarakat pemahaman mengenai perencanaan pembangunan

sehingga nantinya masyarakat mengerti tentang perencanaan pembangunan dan dapat berpartisipasi dengan baik dan aktif dalam kegiatan tersebut. Dalam konsep satu arah, melalui komunikasi, pemerintah dapat menyampaikan informasi, ide, dan gagasannya kepada masyarakat guna mencapai tujuan bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

Untuk itu sudah menjadi tugas dari pemerintah Kota Batu, dalam hal ini BAPPEDA untuk memberikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Dalam bentuk sosialisasi *one way* disini masyarakat diberikan materi satu arah tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan dan yang dapat menarik minat masyarakat agar mau terlibat dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Pada bentuk sosialisasi ini masyarakat diharapkan dapat menyerap dulu segala informasi yang diberikan sebelum mereka menyampaikan aspirasi dan masukan-masukan yang mereka miliki untuk pembangunan di Kota Batu. Jadi nantinya apa yang menjadi masukan masyarakat bisa sesuai dengan prioritas pembangunan di Kota Batu.

b.2 Two Way

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah instrumen yang sangat penting. Sebab perencanaan partisipatif merupakan salah satu dari serangkaian perjalanan pembangunan dan juga tahap awal yang sangat menentukan bagi keberhasilan proses pembangunan khususnya di daerah. Pada fase ini sudah selanjutnya pembangunan di daerah merupakan hasil dari musyawarah yang senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat secara utuh.

Komunikasi menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan. Kegiatan komunikasi merupakan suatu penyampaian tentang ide-ide atau pikiran yang berbeda. Dengan berkomunikasi seseorang atau suatu organisasi akan dapat menyampaikan ide-ide yang terdapat dalam pikirannya kepada orang lain. Jika tanpa ada komunikasi, pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Mengingat dalam proses pembangunan itu melibatkan berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat, maka perlu adanya suatu komunikasi yang menggerakkan dan mengarahkan pihak-pihak tersebut ke arah mana sebenarnya pembangunan itu ditujukan sehingga tidak ada kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah yang dapat menghambat jalannya proses pembangunan.

Perencanaan partisipatif titik fokusnya adalah keterlibatan masyarakat, bahwa perencanaan partisipatif merupakan perencanaan lahir dari bawah (*bottom up*) bukan lahir atas (*top down*) atau Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan sendiri tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik. Untuk itu BAPPEDA Kota Batu dalam proses perencanaan pembangunan juga menerapkan bentuk sosialisasi *two way*.

Dalam sosialisasi dengan bentuk *two way*, masyarakat dapat mengutarakan apa yang menjadi keinginannya dan kebutuhannya dalam pembangunan di Kota Batu. Seperti yang dikemukakan oleh Club Du sahel dalam Mikkelsen (2001:69-70) bahwa dalam pendekatan partisipasi terdapat bentuk partisipasi aktif yakni pendekatan pelatihan dan kunjungan. Dalam jenis partisipasi ini terjadi dialog dan komunikasi dua arah, memberikan kepada masyarakat kesempatan untuk berinteraksi dengan petugas penyuluh dan pelatih dari luar. Hal ini menjadi fasilitas tersendiri bagi pemerintah untuk menampung sebanyak-banyaknya aspirasi dari masyarakat.

Kemudian setelah adanya aspirasi yang masuk dari masyarakat, disini pemerintah dituntut untuk menyerap aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat dengan baik. Namun karena keterbatasan, maka tidak semua masukan dari masyarakat dapat direalisasikan, masukan-masukan dari masyarakat yang telah masuk tadi dipilih berdasarkan prioritas pembangunan Kota Batu.

Penyerapan aspirasi masyarakat tidak semata menjadi tugas BAPPEDA Kota Batu, dalam hal ini terdapat juga penampungan aspirasi masyarakat dengan sistem perwakilan oleh DPRD Kota Batu. Keberadaan lembaga legislatif ini tidak serta merta muncul dengan sendirinya. Lembaga ini terbentuk melalui pemilu yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Partai politik yang memenangkan pemilu akan menempatkan para wakil rakyatnya yang selanjutnya akan mengartikulasikan tuntutan-tuntutan masyarakat. Tuntutan-tuntutan itu

kemudian dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang seharusnya dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan kata lain, partai politik merupakan perwakilan dari suara rakyat yang telah memandatkan suaranya melalui proses pemilu untuk duduk di lembaga legislatif serta diharapkan dapat memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi, tuntutan, dan kepentingan masyarakat.

Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat maka kewajiban DPRD adalah memperhatikan dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berbekal pada program pembangunan pemerintah dalam hal ini perjuangan untuk menampung aspirasi dan partisipasi rakyat sudah di patok untuk kepentingan program pembangunan pemerintah yang dalam prakteknya masih sering melanggar hak-hak asasi warga Negara.

Upaya yang dilakukan DPRD dalam menyapa aspirasi masyarakat didasarkan pada kaidah hukum/aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh penulis, bahwa secara formal Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Batu dalam menyerap aspirasi masyarakat yaitu dengan cara mengadakan kegiatan reses. Kegiatan reses ini dilakukan satu hingga dua kali dalam satu tahun oleh para anggota DPRD dengan tujuan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat. Kegiatan reses ini juga penting karena melalui kegiatan ini masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya agar dapat terakomodir dalam program-program pembangunan pemerintah.

b.3 Media: Cetak dan Elektronik

Pemerintah dalam mensosialisasikan program-program pembangunan dituntut untuk memberikan informasi yang jelas agar informasi tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dengan baik, maka kegiatan tersebut sudah seharusnya menggunakan media informasi yang ada di daerah tersebut.

Media dalam arti alat bantu memang akan sangat penting pada saat pesan harus diketahui oleh komunikan yang jaraknya jauh atau jumlahnya banyak. Media tersebut lebih jelasnya Effendi (2003 : 220) menjelaskan “Media sarana yang dipergunakan oleh komunikator sebagai saluran untuk menyampaikan pesan kepada komunikan, apabila komunikan jauh letaknya atau banyak jumlahnya atau kedua-duanya”. Disamping itu Hedebro dalam Nasution (2004:102-103) Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan dan dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri, sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis untuk menciptakan kepribadian yang *mobile*. Media sebagai sarana penerangan/komunikasi merupakan salah satu alat yang vital dalam proses pembangunan. Dengan menggunakan media tersebut dimaksudkan agar usaha untuk menjangkau masyarakat lebih mudah dilaksanakan.

Terdapat banyak sekali media informasi dan komunikasi yang bisa digunakan untuk memberi informasi pembangunan kepada masyarakat. Efektif tidaknya masing-masing media tersebut dipengaruhi oleh situasi, kondisi dan penerimaan masyarakatnya. Dalam hal ini BAPPEDA Kota Batu menggunakan

peran media setempat untuk membantu mensosialisasikan program pembangunan diantaranya lewat media surat kabar dan televisi lokal.

a) Surat Kabar

Kehadiran media massa merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam percepatan pembangunan di daerah. Menurut AED dalam Nasution (2004:164) terdapat strategi komunikasi pembangunan yang telah digunakan selama ini agar tercapainya kebutuhan-kebutuhan dalam pembangunan dalam hal ini partisipasi masyarakat yakni strategi-strategi yang didasarkan pada media yang dipakai (*media based strategy*). Penggunaan media surat kabar mempunyai peranan penting dalam penyampaian berbagai informasi kepada publik maupun kepada pemerintah yang lebih atas tentang isu di suatu daerah, apalagi bermunculannya media-media cetak surat kabar maupun majalah-majalah baru-baru ini jelas menunjukkan atau indikasi konsumsi masyarakat terhadap informasi sangat tinggi.

Disamping ikut membantu memberikan informasi, media ini juga dapat menampung dan membantu masyarakat yang kurang jelas mengenai proses pembangunan. Selain itu dapat dikethui berbagai saran, keluhan-keluhan dan pendapat yang dingkapkan masyarakat melalui rubrik-rubrik tertentu dalam surat kabar tersebut. Surat kabar berperan mendidik, memotivasi dan mengembangkan opini publik bagi pembangunan, menjelaskan dan menyebarluaskan pesan-pesan pembangunan, serta menjadi media penghubung pemerintah dengan rakyat

Surat kabar merupakan salah satu mediator yang efisien dalam menyampaikan informasi. Surat kabar merupakan media yang dapat menjangkau secara luas ke seluruh pelosok dan penjuru masyarakat tanpa orang atau tokoh harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Melalui media massa pembangunan opini publik dapat dilakukan tanpa harus tokoh politik hadir di masyarakat. Saluran media massa dalam hal ini surat kabar, pada umumnya lebih banyak digunakan untuk komunikasi informatif. Memang pada dasarnya media cetak adalah satu alat untuk mendidik dan mencerdaskan bangsa. Selain itu, adanya kebebasan pers adalah juga bagian dari pelaksanaan HAM secara baik dan benar. sangat jelas fungsi media atau pers adalah satu alat kontrol sosial yang nyata, penunjang, pendorong pelaksanaan pembangunan dan, masyarakat berhak pula untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar “tanpa rekayasa” serta dapat di pertanggungjawabkan oleh media yang memberitakannya. Hal tersebut jelas berdampak positif untuk program-program Pemerintah Pusat ataupun di daerah. Dengan saluran ini pemerintah berusaha untuk memperkenalkan dan memberikan pengetahuan mengenai pesan-pesan pembangunan. Jadi semakin beragam surat kabar yang beredar di Kota Batu, maka akan semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat dalam bidang pembangunan serta semakin luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi-aspirasinya dalam pembangunan Kota Batu saat ini.

b) Televisi Lokal

Manfaat utama dari kehadiran media massa di daerah yakni menjadi forum dialog publik sebagai alat bagi terlaksananya proses demokrasi guna terwujudnya pembangunan masyarakat dan daerah. Schramm dalam Waluyo (2007:4) menyoroti media dalam pembangunan, yang menyebutkan ada tiga fungsi yaitu untuk memberitahu rakyat tentang pembangunan nasional, memusatkan perhatian mereka pada kebutuhan untuk berubah, kesempatan untuk menimbulkan perubahan, metoda dan cara menimbulkan perubahan dan jika mungkin meningkatkan aspirasi, membantu rakyat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog dan menjaga agar informasi mengalir baik ke atas maupun ke bawah, mendidik rakyat agar memiliki keterampilan. Dengan demikian media massa dalam pembangunan mempunyai peranan yang khas. Media massa dapat menjadi pembimbing dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Melalui media massa, masyarakat dapat bercakap-cakap dengan satu sama lainnya, kemudian melalui media ini pemerintah dan para pemimpin akan lebih gampang menyampaikan kebijakannya kepada publik, sebaliknya akan dengan mudah menyampaikan aspirasi. Melalui media pers informasi pembangunan dan sebagainya akan segera tersebar luas, cepat dan tepat kepada publik serta melalui media pers dapat dilakukan proses edukasi publik.

Media Televisi memiliki cakupan khalayak lebih besar, menampilkan video dan audio sehingga memudahkan pola mempengaruhi dan dapat memberikan informasi real. Dengan berbagai kemudahan yang disebutkan diatas televisi lokal menjadi sarana yang sangat efektif dalam memberikan informasi pada masyarakat. televisi lokal memainkan peran dalam mengkomunikasikan ide-ide pembangunan

maupun kebijakan-kebijakan sebagai mana yang menjadi tugas pemerintah. Media ini juga memiliki peranan-peranan lain seperti mendidik dan mempengaruhi masyarakat dengan tayangan-tayangan yang berkualitas, menangkap fenomena-fenomena di sekitar Kota Batu dan menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian menjadi acuan pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan. Yang dimaksud televisi disini adalah televisi lokal milik pemerintah Kota Batu yakni Agropolitan Televisi (ATV). Usaha pemanfaatan media ini dilakukan guna mendukung dan menjamin keberhasilan pelayanan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Keuntungan-keuntungan yang khususnya diperoleh oleh pihak BAPPEDA dengan memanfaatkan televisi lokal di Kota Batu yaitu pihak BAPPEDA dapat mengetahui berbagai macam saran, pendapat dan keluhan-keluhan yang diungkapkan masyarakat melalui dialog interaktif di televisi tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan juga untuk mengetahui umpan balik dari masyarakat terhadap informasi pembangunan yang disampaikan.

Berdasarkan pada tabel 7 banyak sekali program-program acara dari Agropolitan televisi yang dijadikan sarana dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Adanya program-program acara tersebut menjadi sarana pendukung tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling berkomunikasi serta dalam mengakses informasi pembangunan di Kota Batu.

Dengan demikian dapat diketahui betapa penting peran keberadaan televisi lokal dalam pembangunan masyarakat daerahnya, karena merupakan bagian yang sangat strategis dalam proses pembangunan setempat. Tanpa tersedianya media

yang seperti ini maka akan lebih menyulitkan pembangunan daerah yang bersangkutan.

c. Metode Sosialisasi

Masyarakat sebagai obyek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu masyarakat ikut dilibatkan baik dari tahap perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu tentang kondisi lingkungannya. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mensinergikan antara keinginan penguasa dengan dengan keinginan rakyat. Yang mana pada dasarnya partisipasi masyarakat timbul tidaklah semata-mata dengan sendirinya melainkan ada hal-hal yang mampu mempengaruhinya, sehingga masyarakat merasa sadar dan terdorong untuk terlibat lebih jauh dalam segala aspek kehidupan negara. Untuk itu diperlukan metode khusus dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih terbuka dengan program pemerintah dalam pembangunan.

Menggunakan pendekatan yang berpusat pada penerima berarti tetap mengingat penerima ketika sedang berkomunikasi. Sikap empati, peduli, atau peka terhadap perasaan dan kepentingan orang lain bisa menjadi kunci keberhasilan sosialisasi perencanaan pembangunan. Komunikasi dalam sosialisasi dapat dikatakan efektif apabila hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya (orang-orang yang sedang berkomunikasi). Dalam kenyataannya tidak

pernah ada dua manusia yang persis sama, meskipun mereka kembar yang diasuh dan dilahirkan dalam keluarga yang sama, diberi makan yang sama dan diasuh dengan cara yang sama. Namun kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras (suku), bahasa, tindak pendidikan, atau tingkat ekonomi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik dan pada gilirannya karena kesamaan tersebut komunikasi mereka menjadi lebih efektif. Kesamaan bahasa khususnya akan membuat orang-orang yang berkomunikasi lebih mudah mencapai pengertian bersama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memahami bahasa yang sama (Mulyana, 2008 : 117 - 118) . Begitu pula dengan pendekatan budaya yang sesuai dan diminati dengan masyarakat sekitar akan menarik masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

c.1 Pendekatan Bahasa

Sosialisasi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi bersifat dinamis karena sangat tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat pada suatu lingkungan. Sosialisasi mengandalkan proses komunikasi, dan salah satu alat komunikasi adalah bahasa. Untuk itu diperlukan metode khusus, salah satunya dengan pendekatan bahasa. Efendi (1989:60) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai paduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbauan dan sebagainya yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik langsung tatap muka maupun tak langsung

melalui media dengan tujuan mengubah sikap, pandangan dan perilaku”. Lambang dalam hal ini adalah bahasa yang disampaikan. Dengan kata lain, dengan penggunaan pendekatan bahasa tersebut tentunya informasi tidak sekedar beralih tempat dari komunikator kepada komunikan melainkan maksud dari penyampaian informasi tersebut dapat diserap oleh penerima informasi dalam hal ini masyarakat sebagai sasaran pemberian informasi dan pesan-pesan pembangunan.

Bahasa merupakan suatu sarana yang sangat penting yang memiliki fungsi sebagai “cover” dari isi pesan yang akan disampaikan, sehingga pesan tersebut memiliki daya tarik serta mudah diterima oleh komunikan (masyarakat). *Kelas atau kelompok masyarakat yang berbeda cenderung menggunakan bahasa dengan karakter atau corak yang berbeda. Dengan kata lain, latar belakang sosial dan kultural mempengaruhi penggunaan bahasa. Dalam hal ini, pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada berbagai tingkatan mulai dari desa hingga tingkat kota. Masyarakat Kota batu terlebih yang berada di daerah pedesaan umumnya tidak semua dapat mengerti dengan benar Bahasa Indonesia, untuk itu dalam mensosialisasikan programnya, BAPPEDA Kota Batu menggunakan Bahasa lokal atau daerah yaitu bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat sehari-hari yakni Bahasa Jawa.*

Bahasa komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi perencanaan pembangunan di Kota Batu pada tingkat masyarakat yang terbilang masih tradisional cenderung dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yakni tidak

dengan bahasa yang tinggi dan ilmiah serta menggunakan istilah-istilah lokal terutama pemakaian bahasa jawa karena relatif dimengerti oleh masyarakat. pihak BAPPEDA berusaha menyampaikan informasi dengan cara yang tidak berbelit-belit sehingga masyarakat pun mampu menangkap apa yang menjadi tujuan sosialisasi. Hal ini dimaksudkan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan Kota Batu dikemas dengan bentuk pertemuan kekeluargaan sehingga masyarakat dapat merasa lebih dekat dan nyaman dalam menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat.

c.2 Pendekatan Budaya

Unsur-unsur kebudayaan meliputi pranata atau aturan tersurat maupun tersirat dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan agama. Kebudayaan umumnya terbentuk dalam waktu yang lama dan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan tercermin dalam perilaku suatu individu atau masyarakat. Dengan demikian setiap usaha memperkenalkan suatu program kepada masyarakat harus mempertimbangkan kebudayaan yang berlaku dan dianut mereka sehingga informasi dalam sosialisasi dapat diserap oleh masyarakat dengan baik. Menurut Junaidi (2012:1) pendekatan kultural memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat diposisikan sebagai subjek utama sehingga peran mereka lebih terlibat dalam pembangunan. Aspirasi masyarakat dari akar rumput lebih mudah diidentifikasi sehingga program-program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan dengan budaya merupakan media tradisional yang dirasa sangat efektif dalam menjangkau masyarakat Kota Batu baik yang berada di desa maupun perkotaan karena selain dapat menghibur, juga dapat disisipi pesan-pesan pembangunan. Pertunjukan rakyat yang mengemas pesan-pesan pembangunan pun banyak ditampilkan. Kegiatan ini punya daya tarik dan kekuatan tersendiri. Susanto (1988:31) mengatakan bahwa bentuk-bentuk komunikasi melalui pertunjukan rakyat/tradisional di maksud untuk memudahkan penerimaan pesan-pesan oleh masyarakat karena disajikan dalam bentuk yang santai dan mudah dipahami bentuk dan lambangnya dan memancing komunikasi ke atas, yaitu pesan-pesan dari rakyat langsung kepada pemerintah dalam bentuk yang dapat diterima oleh pemerintah.

Seperti yang telah dipaparkan dalam sub bab penyajian data, selama ini BAPPEDA telah mengadakan pertunjukan-pertunjukan kesenian tradisional sebagai media penyampaian informasi program-program pembangunan kepada masyarakat Kota Batu. Penyelenggaraan kesenian tradisional ini dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat. walaupun masyarakat telah mendapatkan informasi yang cepat dengan adanya teknologi komunikasi yang serba canggih, namun dengan adanya pertunjukan-pertunjukan kesenian selain untuk melestarikan budaya, juga efektif sebagai sarana penyampaian informasi pembangunan. Dengan demikian masyarakat berminat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sehingga dapat tridentifikasi jenis-jenis usulan dan rencana kegiatan berdasarkan pada kekuatan dan potensi yang ada serta kebutuhan riil masyarakat.

d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Mulai Tahap *Assesment*, Tahap Alternatif Program/Kegiatan, Tahap Pelaksanaan Dan Tahap Evaluasi Dalam Perencanaan Pembangunan.

Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

Menurut Adi (2001:208), dalam perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu komunitas, belumlah cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat hendaknya pula meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak diarahkan (non direktif), sehingga partisipasi masyarakat meliputi proses-proses:

- a. Tahap *Assesment*
- b. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.
- c. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.
- d. Tahap evaluasi (termasuk didalamnya evaluasi input, proses dan hasil).

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dilihat bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat bersama-sama pihak terkait lainnya dalam berbagai tahapan pembangunan akan menghasilkan konsensus dalam kebijakan pembangunan, dan sekaligus melatih masyarakat menjadi lebih pandai khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Dalam hal ini pihak BAPPEDA Kota Batu berupaya melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan proses pembangunan, terdapat konsultasi publik dalam setiap produk pembangunan di Kota Batu karena partisipasi masyarakat dalam manajemen pembangunan akan menghantarkan masyarakat untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, menganalisa akar-akar masalah tersebut, mendesain kegiatan-kegiatan terpilih, serta memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Sebenarnya jika masyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalam keseluruhan proses, selain program itu akan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan rasa kepemilikan warga masyarakat terhadap program akan lebih tinggi, juga ketrampilan analisis dan perencanaan tadi teralihkan kepada masyarakat.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Batu.

a. Faktor Pendukung

1) Fasilitas Sarana prasarana

Dalam penyelenggaraan sosialisasi diperlukan sarana prasarana yang mendukung guna memperlancar kegiatan komunikasi serta kegiatan lain di dalamnya. Effendy (2005:92) menyatakan Komunikasi pembangunan

merupakan proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah, yang dalam keselarasannya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat. Untuk itulah sarana prasarana berfungsi sebagai memperlancar proses tersebut.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai alat penunjang kegiatan akan memungkinkan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, sarana prasarana yang memadai akan dapat meningkatkan kualitas hasil kerja, maupun dalam hal ketepatan waktu. Sebaliknya bila fasilitas dari sarana dan prasarana tidak memadai maka akan banyak mempengaruhi pada akhir dari setiap kegiatan, karena tidak menutup kemungkinan akan munculnya banyak hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, semangat kerja akan terhambat bahkan mungkin akan mengalami penurunan.

Berdasarkan data-data tabel 8, dapat dikatakan bahwa fasilitas sarana dan prasarana sudah cukup memadai. BAPPEDA telah mempunyai gedung sendiri, selain itu juga tersedia alat-alat transportasi serta peralatan pendukung lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi perencanaan pembangunan. Dengan demikian sarana prasarana yang berada di BAPPEDA Kota batu memadai sehingga proses pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi program-program pembangunan kepada masyarakat dengan tujuan peningkatan partisipasi masyarakat dapat terwujud dengan baik.

2) Ketokohan

Keberadaan tokoh agama ataupun tokoh masyarakat dalam suatu lingkungan cukup besar pengaruhnya terhadap masyarakat setempat. Masyarakat cenderung memiliki ketergantungan kepada sosok yang ditokohkan. Tokoh agama dan tokoh masyarakat dianggap mampu menjaring, membina masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Tokoh masyarakat tersebut mempunyai pengaruh terhadap masyarakat setempat. Dalam situasi ini biasa disebut dengan kepemimpinan informal yaitu kepemimpinan yang timbul dari adanya unsur kekayaan, pendidikan, keagamaan ataupun keturunan (Sumintarsih, 1992 : 66). Jenis kepemimpinan ini muncul karena dalam masyarakat terdapat kepentingan baru baik dalam bidang agama, politik dan sebagainya. Biasanya peranan pemimpin informal ini tidak hanya terbatas pada wilayah desanya namun mencakup wilayah-wilayah lain. Pimpinan informal tidak memiliki jabatan resmi. Hanya pada saat tertentu saja dalam lingkungan masyarakat dia muncul sebagai penasehat. Pemimpin-pemimpin informal biasanya terdiri dari orang-orang terkemuka dan berpengaruh di dalam masyarakat. Mereka dapat berasal dari golongan tua yang berpengaruh dalam masyarakat, pemimpin organisasi, ataupun ulama. Munculnya tokoh-tokoh dalam suatu masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kondisi masyarakat itu sendiri, situasi dan adanya kekhususan masyarakat yang bersangkutan (Sumintarsih, 1992 : 63). Kondisi masyarakat dapat memungkinkan munculnya tokoh-tokoh kepemimpinan, karena masyarakat membutuhkan kehadirannya.

Sosialisasi dengan pelibatan tokoh agama maupun tokoh masyarakat mutlak diperlukan karena masyarakat pada umumnya masih banyak bergantung dengan tokoh masyarakat setempat. Dengan adanya keterlibatan tokoh agama maupun masyarakat maka juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Untuk itu dengan melibatkan tokoh masyarakat akan mendukung terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat Kota Batu.

Berdasarkan penelitian, pihak BAPPEDA Kota Batu mengaku terbantu dengan adanya keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi karena dapat memudahkan dalam merangkul masyarakat agar mau berpartisipasi dalam tahap perencanaan pembangunan.

b. Faktor Penghambat

1) Pemahaman Masyarakat

Pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah sebuah tuntutan yang tidak dapat ditunda lagi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai banyak kendala dalam setiap tahapannya, diantaranya adalah pada tahap perencanaan. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan seringkali menjadi kendala dalam melaksanakan perencanaan partisipatif.

Masyarakat masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga kadang usulannya belum sesuai dengan yang sebenarnya dibutuhkan, selain itu masyarakat masih belum memahami benar mengenai proses dan tahap-tahap dalam pembangunan. Masyarakat dalam menyampaikan

aspirasinya selalu ingin cepat direalisasikan, padahal usulan masyarakat pada saat tahun ini adalah untuk program pembangunan tahun depan. Berdasarkan hal tersebut terlihat bawa pemahaman masyarakat dalam proses pembangunan terbilang rendah.

Perlu adanya penyediaan model pembelajaran publik yang murah dan mudah dalam mendidik, dan mengajarkan keterampilan yang bermanfaat. Dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, masyarakat dapat lebih kritis dan mandiri memahami posisinya serta lingkungannya. Melalui interaksi, informasi, komunikasi, dan sosialisasi dalam berbagai saluran, proses komunikasi pembangunan kemudian dianggap sebagai bentuk pencerahan, penguatan dan pembebasan dari ketergantungan dan keterbelakangan sehingga mempermudah menerima suatu inovasi yang ditujukan kepada mereka serta otomatis dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pembangunan.

2) Rasa Kurang Memiliki Terhadap Pembangunan

Keberhasilan pembangunan masyarakat sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat dalam segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya dan merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Manusia merupakan faktor utama dalam menentukan cepat atau tidaknya sebuah program pembangunan dilangsungkan, untuk itu keterlibatan masyarakat

sangat berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan. Namun pada kenyataannya masyarakat masih terkesan acuh terhadap pembangunan. Berbagai rencana pembangunan yang dimiliki pemerintah semestinya sudah mulai mengajak partisipasi masyarakat. Karena tanpa didukung peran serta masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif. Dari tahun ke tahun, proses pembangunan yang dilakukan pemerintah ternyata juga semakin dikritisi oleh masyarakat. Dan dampaknya, tumbuh bias-bias negatif dari masyarakat terhadap proses pembangunan yang sedang atau akan dilakukan. Salah satu gejala negatif yang muncul di tengah masyarakat, yakni tumbuhnya sebuah sikap yang apatis terhadap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Sekurang-kurangnya, ternyata masyarakat ada yang tidak peduli dengan proses pembangunan yang sedang dan akan dilakukan. Ini jelas menunjukkan adanya sebuah gejala kurangnya partisipasi masyarakat terhadap agenda pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran public (*public awareness*) terhadap perencanaan pembangunan masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sebagai akibat dari hilangnya kepercayaan mereka terhadap pemerintah karena selama ini pelayanan yang diberikan masyarakat masih belum maksimal.

Sebagaimana termuat di dalam Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, seiring dengan semangat demokrasi dan sosio-ekonomi yang kian tumbuh di tanah air, maka penyelenggara pelayanan publik harus memenuhi kriteria kepastian hukum terhadap pengguna pelayanan publik.

Sehingga realisasinya adalah suatu intensitas kesadaran atas hak, kewajiban, tanggungjawab, dan kewenangan dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik. Namun masyarakat masih seringkali mengeluhkan mutu pelayanan yang tidak memadai sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku serta berbagai prinsip dan azas-azas dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik (*public service*). Kurangnya pelayanan publik yang diberikan pemerintah inilah yang kemudian menjadikan masyarakat merasa apatis terhadap program-program pembangunan pemerintah. Akibatnya perencanaan pembangunan yang seharusnya melibatkan masyarakat tidak dapat terwujud sehingga hasil pembangunan pun tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga inilah yang menjadikan masyarakat merasa tidak menikmati hasil dari pembangunan.

